



RENSTRA 2025-2029



RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 207);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V PENUTUP

- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Oktober 2025
Gubernur NUSA TENGGARA BARAT,

LALU MUHAMADIQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 30 Oktober 2025
P. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

LALU M. FAOZAL



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SAMBUTAN

Assalammu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah wasyukurillah, puji syukur kehadiran Allah Subhannahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas telah tersusunnya Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan pembangunan strategis perangkat daerah yang disusun oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rencana Strategis Perangkat Daerah dipedomani dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang lebih lanjut digunakan oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Saya berharap agar dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Daerah Tahunan yang selanjutnya untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2025-2026.

Akhir kata, saya selaku Gubernur Nusa Tenggara Barat menghimbau agar seluruh jajaran Pemerintah Daerah di Tingkat Provinsi untuk menjalankan program dan kegiatan prioritas Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk mewujudkan pencapaian seluruh indikator dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Koordinasi dan Kerjasama dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan prioritas perlu ditingkatkan guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Terima Kasih.

Wallahulmuwafiqu Wal Hadi Ilasabilirrasyyad

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh



LALU MUHAMAD IQBAL

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah- Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Secara umum, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 ini berisikan informasi mengenai gambaran pelayanan, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama lima tahun. Dengan terbitnya Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB ini, diharapkan dapat menjadi rujukan di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB, agar setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB memahami dengan benar beban tugasnya masing masing sehingga dapat menjalankan fungsi organisasi secara keseluruhan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB ini, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus, semoga Renstra ini dapat bermanfaat.

Mataram, 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



HENDRA SARTIKA S.STP., M.H.
NIP. 09810130 199912 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB	9
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD	9
2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD (Manusia, Modal/Anggaran)	19
2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD	23
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	35
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah	35
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis pada Sekretariat DPRD	36
2.2.1 Permasalahan Pelayanan pada Sekretariat DPRD	36
2.2.2 Isu Strategis.....	40
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	48
3.1. Tujuan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.....	49
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029	51
3.3. Strategi Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.....	53
3.4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD dalam mencapai Tujuan dan Sasaran.....	57
BAB IV	
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA AN BIDANG URUSAN	59
4.1. Uraian Program	59
4.2. Uraian Kegiatan	61

4.3. Uraian Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	66
4.4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan	
Daerah	81
4.5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD	
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD.....	83
4.6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029	
Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	84
BAB V	
PENUTUP	86
5.1. Kesimpulan Penting Substansial	86
Kaidah Pelaksanaan dan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap	
Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan	
Daerah.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	10

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
Tabel 2.1	Jumlah PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 berdasarkan Eselon.....	21
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 Berdasarkan Pangkat/Golongan.....	21
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan.....	21
Tabel 2.4	Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2024.....	22
Tabel 2.5	Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2024.....	23
Tabel 2.6	Kondisi Aset Tetap Tahun 2023 dan 2024.....	23
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Sek.DPRD Tahun 2019-2024.....	25
Tabel 2.8	Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024.....	26
Tabel 2.9	Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Sek.DPRD Tahun 2021-2025.....	27
Tabel 2.10	Capaian Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD Tahun 2021-2025.....	28
Tabel 2.11	Kolaborasi/Kemitraan Kegiatan, Subkegiatan pada Sekretariat DPRD NTB..	35
Tabel 2.12	Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	39
Tabel 2.13	Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	45
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029.....	49
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran Program Unggulan dan Kegiatan Strategis RPJMD Provinsi NTB yg menjadi Pedoman Renstra Sek.DPRD NTB.....	50
Tabel 3.3	Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB	51
Tabel 3.4	Kekuatan, Kelemahan, Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan (<i>swot</i>) di Sekretariat DPRD Provinsi NTB.....	52
Tabel 3.5	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD NTB dengan Renstra Sek.DPRD Provinsi NTB.....	54
Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra.....	55
Tabel 3.7	Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2026-2030.....	56
Tabel 3.8	Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB	58
Tabel 4.1	Cascading Kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran sampai dengan Outcome dan Output Sekretariat DPRD NTB.....	59
Tabel 4.2	Rumusan Program, kegiatan, Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB	62
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan	66
Tabel 4.4	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	81
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB	84
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci IKK Tahun 2025-2030	85
Tabel 5.1	Kesimpulan	86

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai Instrumen untuk mengukur kinerja dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. RENSTRA adalah instrument awal atau landasan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karenanya, RENSTRA harus berisikan informasi berupa Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Strategi, Target, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta menitikberatkan pada hasil (outcome)

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 258 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional. Berdasarkan Instruksi menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 Kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan ketua DPRD Kabupaten/Kota untuk segera menyusun dan membahas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Tahun 2025-2029 yang selaras dan berpedoman pada RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta Gubernur memerintahkan Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Provinsi.

Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029. RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sehingga perlu dilakukan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah terintegrasi ke dalam SIPD (Sistem informasi pemerintahan daerah) yang diperbaharui dengan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-3406 Tahun

2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam Upaya mewujudkan keterpaduan dan keberlanjutan Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025-2045 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Renstra Teknokratik Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Mengacu pada hal tersebut maka disusun Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 Selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang nantinya digunakan sebagaipedoman dalam penyusunan anggaran daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD dan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447, sesuai dengan lampiran peraturan tersebut);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 14. Inmendagri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 10);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6);
 20. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 tentang Panduan Teknis Pengarusutamaan Gender di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 39);
 21. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 28);

22. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 11);
23. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 25);
24. Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 53).

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun sebagai pedoman perencanaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB untuk 5 (lima) tahun (2025-2029) yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan serta program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

2. Tujuan

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode 2025-2029.
- b. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB setiap tahun selama periode Renstra.
- c. Menjadi tolak ukur dalam pengukuran capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
- d. Menjadi panduan dalam meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktifitas dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1. Merumuskan Latar Belakang Penyusunan Renstra Perangkat Daerah (PD) Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dilengkapi dengan definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD.
2. Mengidentifikasi Dasar Hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029
4. Menjelaskan Sistematika Penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing Bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur PD,
 - b. Sumber Daya PD (manusia, modal/anggaran),
 - c. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan PD,
 - d. Kelompok Sasaran Pelayanan PD,
2. Identifikasi Permasalahan Umum/Dominan (kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal/yang seharusnya) yang dirumuskan dari bab II, Rancangan Awal RPJMD tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD atau hasil penjarangan aspirasi PD.
3. Identifikasi Isu Strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD secara langsung ataupun tidak langsung
4. Merumuskan Isu Strategis Daerah yang disimpulkan dari permasalahan, isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan

regional) dan potensi daerah yang menjadi kewenangan PD yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang merupakan *intermediate outcome* dengan jangka waktu 5 (lima) tahun
2. Keterkaitannya dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
3. Menyajikan Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 yang komprehensif melalui Optimalisasi Sumber Daya, tahapan, Fokus dan Penentuan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
4. Menyajikan Pentahapan Pembangunan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran PD.
5. Menyajikan Lokus Renstra PD berdasarkan wilayah pengembangan sesuai dengan kebutuhan pengembangan daerah.
6. Menyajikan Arah kebijakan Renstra PD tahun 2025-2029 sesuai dengan Tugas dan fungsi PD dan Arah Kebijakan RPJMD serta selaras dengan Strategi dalam rangka mencapai Target Tujuan dan Sasaran Renstra PD.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Menyajikan Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output.
2. Menyajikan Uraian Kegiatan.
3. Menyajikan Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif.
4. Menyajikan Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah.
5. Menyajikan Target keberhasilan pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD, dan
6. Menyajikan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

1. Menyajikan Kesimpulan Penting Substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB

2.1 Gambaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Sesuai Undang Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 9 ayat 4, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah paragraf 2 pasal 9 ayat 5 menyatakan bahwa Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi dan penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi.

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Tugas Pokok Sekretariat DPRD Provinsi NTB Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB (SETWAN) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. SETWAN mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SETWAN menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

- penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
- penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

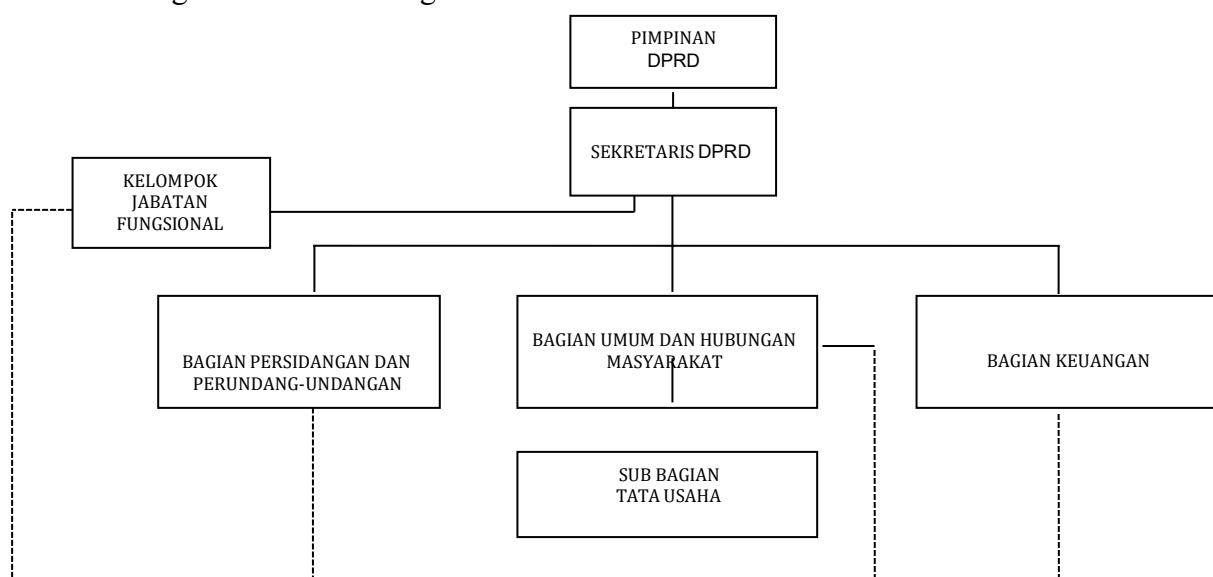
Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB terdiri dari :

- Sekretariat DPRD,
- Bagian Persidangan dan Perundang-undangan,
- Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha,
- Bagian Keuangan, dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB



Sumber : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023

Uraian Tugas dan Fungsi

I. SEKRETARIS

➤ Rincian Tugas

- a. Merumuskan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan, Rapat dan Risalah serta Keuangan;
- b. Merumuskan bahan kebijakan dan menyalenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Kesekretariatan DPRD;
- c. Merumuskan bahan kebijakan dan menyelenggarakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi kegiatan Kesekretariatan DPRD;

- d. Merumuskan bahan kebijakan dan menyediakan, serta mengoordinasi kelompok pakar atau tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan rencana kegiatan alat kelengkapan DPRD;
- f. Merumuskan bahan kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan asset/barang milik daerah pada Sekretariat DPRD;
- g. Merumuskan bahan kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Rapat-Rapat, Kunjungan Kerja, Konsultasi, Workshop, Reses, Hearing, dan kegiatan DPRD lainnya;
- h. Merumuskan bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- i. Merumuskan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- j. Merumuskan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Perumusan dan penyelenggaraan bahan/ materi kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- b. Perumusan dan penyelenggaraan Rencana/Program kebijakan di bidang Kesekretariatan DPRD;
- c. Perumusan dan Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, serta Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- d. Perumusan dan Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- e. Perumusan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- f. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

II. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Rapat dan Risalah, Alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi, serta Perundang-undangan Dokumentasi dan Perpustakaan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah, penyusunan Naskah Akademik dan draf Raperda inisiatif, serta penyelenggaraan persidangan;
- d. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, serta mengumpulkan bahan penyiapan draf Raperda Inisiatif;
- e. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM) dan risalah rapat, serta mengoordinasikan pembahasan Raperda;
- f. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan hubungan masyarakat, publikasi dan keprotokolan;
- g. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan dan penyediaan bahan rapat, persidangan dan penyusunan risalah;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan mengoordinasikan layanan rapat kegiatan alat kelengkapan Dewan dan kegiatan fraksi DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan dan mengadministrasikan kegiatan layanan Perundang-undangan, dokumentasi dan perpustakaan;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Persidangan dan Perundangundangan;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPI, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Persidangan dan Perundang-undangan;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- b. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Persidangan dan Perundang-undangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah;
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

III. BAGIAN UMUM DAN HUMAS

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam, Humas, Protokol dan Perjalanan, serta Tata Usaha;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan menyelenggarakan ketatausahaan Sekretariat DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan asset/ Barang Milik Daerah;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan mengelola kepegawaian Sekretariat DPRD, administrasi keanggotaan DPRD; serta tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD, serta menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
- e. Memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD;
- f. Memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;

- i. Menyusun bahan kebijakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup tata usaha, kepegawaian, urusan dalam, rumah tangga, ketertiban keamanan, humas dan protokol;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Umum dan Humas;
- l. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPJ, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Umum dan Humas;
- m. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Umum dan Humas;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Sub Bagian Tata Usaha

➤ **Rincian Tugas**

- a. Menyiapkan bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Tata Usaha;
- b. Menyiapkan bahan kebijakan dan menyusun rencana/ program kebijakan teknis Tata Usaha;
- c. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan surat menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan pimpinan DPRD, melaksanakan kearsipan, menyusun

- administrasi kepegawaian, serta menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian, menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli dan menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai;
 - e. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan administrasi dan kearsipan biodata pimpinan dan anggota DPRD;
 - f. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengawasan dan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. Menyiapkan bahan kebijakan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kearsipan, serta penggandaan, pendistribusian naskah dinas;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi;
 - i. Menyiapkan bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Tata Usaha;
 - j. Menyiapkan bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPI, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Tata Usaha;
 - k. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

IV. BAGIAN KEUANGAN

➤ Rincian Tugas

- a. Menyusun bahan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Perencanaan, Tata Usaha Keuangan serta Verifikasi dan Pembukuan;
- b. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan KUA PPAS/KUPA PPAS Perubahan;
- c. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan Pembahasan APBD/APBDP, Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, serta laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;

- d. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah, serta terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
- e. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD; memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat, mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan, serta pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
- f. Menyusun bahan kebijakan dan memfasilitasi, memverifikasi, dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, serta persetujuan kerjasama daerah;
- g. Menyusun rencana, program dan petunjuk teknis kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- h. Menyusun bahan kebijakan dan melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- i. Menyusun bahan kebijakan Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, pembukuan, administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
- j. Menyusun bahan dan melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi;
- k. Menyusun bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, RKA/DPA kegiatan Sekretariat DPRD;
- l. Menyusun bahan laporan kinerja instansi pemerintah, LKPI, LPPD, RLPPD dan laporan kegiatan Sekretariat DPRD;
- m. Menyusun bahan usulan Rencana Strategis, usulan Rencana Kerja, usulan RKA/DPA kegiatan Keuangan;
- n. Menyusun bahan usulan laporan kinerja instansi pemerintah, usulan LKPI, usulan LPPD, usulan RLPPD dan laporan kegiatan Keuangan;

- o. Mendistribusikan tugas dan menilai kinerja bawahan; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

➤ **Rincian Fungsi**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan bahan/ materi kebijakan di bidang Keuangan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana/Program kebijakan di bidang Keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
- d. Penyusunan kebijakan dan Penyediaan, pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 11 Tahun 2023 disebutkan bahwa Penetapan Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan keahlian dan ketrampilan. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas wajib berkoordinasi kepada Pejabat Administrator dan/atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi. Adapun tugas dan fungsi jabatan fungsional yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

Jenis-Jenis Fungsional pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

1. Fungsional Analis Kebijakan

Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah. Kajian dan Analisis Kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme,

akuntabilitas, integritas, efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik.

2. Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Fungsional Perisalah Legislatif

Fungsional Perisalah Legislatif adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang risalah legislative yang meliputi penyusunan risalah rapat, penyusunan dokumen kelengkapan risalah rapat, penyusunan analisis dan anotasi himpunan risalah rapat, serta pengembangan sistem risalah rapat legislatif.

4. Fungsional Perencana

Secara umum tugas jabatan fungsional perencana adalah membantu Pimpinan dalam menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

5. Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan analisis keuangan pusat dan daerah dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah terutama yang berkaitan dengan aspek peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, sistem dan prosedur, sarana dan prasarana, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dan, dilakukan pada sebagian atau keseluruhan siklus pengelolaan keuangan negara dan daerah.

6. Fungsional Hubungan Masyarakat

Tugas dan Fungsi Fungsional Hubungan Masyarakat adalah membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. Kegiatan kehumasan yang paling umum adalah menulis, menyunting (editing), editing foto dan video, mengelola media internal, termasuk pengelolaan website dan media sosial, membuat *press release* (rilis), menggelar konferensi pers, dan kunjungan ke media (*media visit*).

7. Fungsional Arsiparis

Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu diduduki oleh Arsiparis PNS yang mempunyai ruang lingkup fungsi, dan tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis menjadi informasi publik pada Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Desa, dan Perguruan Tinggi Negeri.

8. Fungsional Pranata Komputer

Fungsional Pranata Komputer adalah melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

2.1.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun pertama penyelenggaraan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026. Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan melaksanakan 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 73 (tujuh puluh tiga) subkegiatan. Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp.130.077.038.339,- yang merupakan gabungan antara Anggaran DPRD dan Anggaran Sekretariat DPRD.

Adapun Anggaran Tahun 2024 Sebesar Rp.130.077.038.339,- sampai dengan Bulan Desember 2024 terealisasi sebesar Rp.120.568.582.054,- dengan sisa anggaran sebesar Rp. 9.508.456.285 (7,31%). Realisasi keuangan program dan kegiatan Tahun 2024 adalah rata-rata sebesar 92,69%, dan realisasi fisik rata-rata 96,40%. Realisasi berdasarkan program yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp.70.568.136.612,- (95,08%).
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan fungsi DPRD Rp.50.000.445.442,- (89,51%).

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis untuk mewujudkan aspirasi Masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas.

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam organisasi untuk mencapai tujuannya, karena manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang dapat membuat sumber daya lainnya berkerja dan berdampak langsung terhadap kinerja organisasi. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB perlu disesuaikan dengan kebutuhan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi pelayanan terhadap kegiatan dan tugas-tugas DPRD. Sumber daya manusia yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Pegawai Berdasarkan Eselon**

Tabel 2.1
Jumlah PNS Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	3	-	3
3	Eselon IV	-	1	1
4	Fungsional Khusus	8	3	11
5	Fungsional Umum	71	32	103
Total		83	36	119

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Des Tahun 2024

- **Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan**

Komposisi Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 5 orang atau 4,20%, golongan III sebanyak 75 orang atau 63,03% dan golongan II sebanyak 37 orang atau 31,09% dan sisa golongan I sebanyak 2 orang atau 1,68%.

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Golongan IV	5	-	5
2.	Golongan III	49	26	75
3.	Golongan II	27	10	37
4.	Golongan I	2	-	2
Total		83	36	119

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Des Tahun 2024

- **Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa pegawai yang mendominasi adalah pegawai berpendidikan D1/D2 ke atas sebanyak 67 orang atau 56,30%, hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan pegawai di Sekretariat DPRD Provinsi NTB mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya 45,76% di tahun 2023. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2024
Berdasarkan Pendidikan

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	PENDIDIKAN S3	0	0	0
2.	PENDIDIKAN S2	9	1	10

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
3.	PENDIDIKAN S1	32	18	50
4.	PENDIDIKAN D IV	1	1	2
5.	PENDIDIKAN D III	2	2	4
6.	PENDIDIKAN D II	0	1	1
7.	PENDIDIKAN D I	0	0	0
8.	PENDIDIKAN SMK/SMA/PAKET C	35	13	48
9.	PENDIDIKAN SMP/PAKET B	3	0	3
10.	PENDIDIKAN SD	1	0	1
	Total	83	36	119

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Prov. NTB Des Tahun 2024

- **Pegawai Non PNS**

Sumber daya manusia Sekretariat DPRD Provinsi NTB selain PNS juga terdapat Pegawai Tidak Tetap sebanyak 3 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 153 orang.

2.1.2.2. Sumber Daya Modal/Anggaran

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB diantaranya adalah gedung DPRD, Gedung Sekretariat DPRD, Kendaraan Dinas, Komputer dan lain-lain. Rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat dilihat dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2024-2025

No	Nama Aset	Jumlah*	Tahun 2025				
		Tahun 2024	Hilang	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Kondisi Baik
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Alat-alat Besar	18 Buah					
2	Alat-alat Angkutan	90 Buah					
3	Alat Pertanian	18 Buah					
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.247 Buah					
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	460 Buah					
6	Alat-alat Kedokteran	1 Buah					
7	Alat-alat Persenjataan/Keamanan	229 Buah					
8	Bangunan Gedung	23 Buah					
9	Monumen	2 Buah					
10	Jalan dan Jembatan	1 Buah					
11	Instalasi	4 Buah					
12	Jaringan	32 Buah					
13	Barang Bercorak Kebudayaan	9 Buah					

Sumber : Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam Tahun 2025* Masih dalam perhitungan hilang akibat forse mayor (rusak pasca insiden pembakaran gedung dan fasilitas kantor)

Tabel 2.5
Peralatan dan Mesin Sekretariat DPRD Prov. NTB Tahun 2023 dan 2024, 2025*

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Alat Besar	117.343.290,00	117.343.290,00
Alat Angkutan	14.870.984.028,00	15.805.730.528,00
Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.500.000,00	4.500.000,00
Alat Pertanian	34.415.000,00	34.415.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	12.830.980.729,41	12.482.731.729,41
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	3.532.851.684,00	3.532.851.684,00
Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.900.000,00	21.900.000,00
Alat Laboratorium	8.850.000,00	8.850.000,00
Alat Persenjataan/Keamanan	73.685.500,00	73.685.500,00
Komputer	3.052.594.757,00	2.927.794.757,00
Peralatan Olahraga	850.748.000,00	850.748.000,00
SALDO	35.398.853.948,41	35.860.550.448,41

Sumber : Sub Bagian Urusan Dalam dan Pengamanan Dalam Tahun 2025 Masih dalam perhitungan hilang akibat forse mayor (rusak pasca insiden pembakaran gedung dan fasilitas kantor)*

Seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris, nilai buku Asset Tetap pada akhir tahun 2024 sebesar Rp. **49.369.181.119,26**. Rincian aset tetap dan aset lainnya dapat dilihat pada tabel 2.6 di bawah.

Tabel 2.6
Kondisi Aset Tetap Tahun 2024 dan 2023

URAIAN	2024 (Rp)	2023 (Rp)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
ASET TETAP		
Tanah	13.379.350.000,00	13.379.350.000,00
Peralatan dan Mesin	35,398,853,948,41	35.860.550.448,41
Gedung dan Bangunan	38.123.371.091,26	38.123.371.091,26
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.396.558.372,00	1.396.558.372,00
Aset Tetap Lainnya	966.834.550,00	966.834.550,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	147.180.000,00	147.180.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(40.042.966.842,41)	(38.340.961.150,41)
JUMLAH ASET TETAP	49.369.181.119,26	51.532.883.311,26

Sumber : Laporan Keuangan Setwan 2024, Data 2025 Masih dalam perhitungan hilang akibat forse mayor (rusak pasca insiden pembakaran gedung dan fasilitas kantor)*

2.1.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD yang merupakan lembaga yang melakukan pelayanan/fasilitasi terhadap DPRD dalam rangka membantu menyelenggarakan tugas dan wewenang DPRD memberikan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya. Salah satu ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD yaitu berdasarkan tingkat keberhasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Capaian kinerja Sekretariat DPRD dapat disajikan dalam tabel 2.7 dan 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.7
Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Sek.DPRD Tahun 2019-2024

No	Target NSPK	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		<u>TUJUAN:</u> Terwujudnya Layanan Kesekretariat an DPRD yang Berkualitas		Indeks Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Kategori	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik *	Baik	100	100	100	100	100	100
		<u>SASARAN:</u> Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		<u>TUJUAN:</u> Terwujudnya Layanan Kesekretariat an DPRD yang Berkualitas Melalui Pengelolaan Kelembagaan		Tingkat Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Persentase						Baik						Baik						100
		<u>SASARAN:</u> Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Nilai SAKIP Lingkup OPD	Nilai/Point						BB/79						BB/72,05						91,20
		Meningkatnya Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Cakupan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase						100						100						100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Tabel 2.8
Capaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024

No	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1				Rancangan peraturan daerah yang dibahas dan disetujui	Perda	16	16	12	12	12	12	14	11	16	8	4	12	87,50	68,75	133,33	66,67	33,33	100
2				Kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi	Kali	480	120	48	480	48	480	540	60	1077	925	48	895	112,50	50,00	2,243	192,71	1,000	186,5
3				Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi	Kali	252	480	480	480	480	225	268	540	192	207	480	193	106,35	112,50	40,00	43,13	100	85,78
4				Rapat Paripurna yang difasilitasi	Kali	48	252	48	48	36	46	46	268	40	42	46	39	95,83	106,33	83,33	87,50	127,78	84,78
5				Laporan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD yang difasilitasi	Kali	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	66,67	100	100	100	100	100
6				Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD yang difasilitasi	Kali	28	2860	2860	2860	2860	1950	28	2898	4918	3182	2860	5.395	100	101,33	171,96	111,26	100	276,7
7				Kegiatan Peningkatan Kapasitas (bintek/workshop) yang diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/Orang	3	65	65	65	65	65	3	65	65	65	65	130	100	100	100	100	100	200
8				Publikasi Kegiatan Pimpinan	Kali	32	32	36	36	36	36	39	53	53	68	36	34	121,88	165,	147,	188,	100	94,44

No	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Anggota DPRD yang difasilitasi															63	22	89		

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Realisasi capaian kinerja pelayanan sekretariat DPRD tahun 2019-2024 pada tabel 2.7 dan tabel 2.8, menunjukkan rasio capaian kinerja pelayanan sekretariat DPRD pada rentang rasio 94,44-188,89%. Kontribusi terbesar capaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD ini pada kegiatan hearing/dialog pimpinan dan anggota DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama yang difasilitasi.

Tabel 2.9. Capaian Kinerja Tujuan & Sasaran Sek.DPRD Prov.NTB Tahun 2019-2024

No	Kode	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		TUJUAN: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Fasilitasi dan Dukungan Sekretariat DPRD Dalam Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi		Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks)	INDEKS	-	-	-	-	-	-	91,16	87,21	60,00	28,57	15,38	47,37
				Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan masyarakat (%)	PERSEN	-	-	-	-	-	-	66,14	62,88	100	67,69	76,92	70,77
		SASARAN 1: Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	PERSEN	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	PERSEN	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA

No	Kode	Target IKU	Target Indikator Lainnya	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun					
						2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		SASARAN 2: Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan		Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	PERSEN	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Data untuk sebagian indikator pada Tabel 2.9 belum tersedia karena indikator tersebut baru diperkenalkan untuk periode Renstra Sekretariat DPRD NTB (Setwan) tahun 2025-2029."

Tabel 2.10
Capaian Kinerja Anggaran Sekretariat DPRD pada Tahun 2021-2025

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	56.052.686.737	63.521.437.877	70.036.047.294	78.948.221.624	77.527.186.057	62.442.348.027	70.134.887.190	75.851.947.855	74.219.854.919	78.821.606.448	111,40	110,41	108,30	94,01	101,67	7,66	5,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	289.741.100	328.346.682	358.488.325	607.311.900	668.043.090	374.044.100	545.298.200	582.119.900	576.441.700	608.147.200	129,10	166,07	162,38	94,92	91,03	26,11	12,52
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27.187.700	30.810.234	33.676.093	196.351.200	215.986.320	84.027.100	183.271.000	208.439.200	186.337.900	193.128.600	309,06	594,84	618,95	94,90	89,42	138,89	25,97
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	80.564.200	91.298.707	99.790.989	82.371.400	90.608.540	77.348.900	77.806.000	78.131.600	83.834.100	64.339.000	96,01	85,22	78,30	101,78	71,01	2,49	3,36
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	75.288.800	85.320.404	93.156.605	118.314.400	130.145.840	64.651.700	105.361.200	70.795.800	93.733.600	108.733.600	85,87	123,49	76,00	79,22	83,55	14,57	13,64
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	30.042.000	34.044.846	37.211.576	13.068.300	14.375.130	12.058.800	12.968.900	13.068.300	13.048.300	13.058.200	40,14	38,09	35,12	99,85	90,84	10,43	1,66
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	27.119.000	30.732.380	33.590.997	30.284.000	33.312.400	36.843.800	23.440.000	24.472.400	30.184.000	30.184.000	135,86	76,27	72,85	99,67	90,61	4,57	3,62
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.488.400	25.484.791	27.555.296	42.391.200	46.630.320	14.988.300	35.135.100	34.741.200	40.292.400	40.292.400	66,65	137,87	126,08	95,05	86,41	21,47	33,77
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27.051.000	30.655.320	33.506.769	124.531.400	136.984.540	84.125.500	107.316.000	152.471.400	129.011.400	158.411.400	310,99	350,07	455,05	103,60	115,64	81,28	17,66

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGAR AN	REALI SASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.847.520.666	12.166.160.627	15.306.870.980	13.501.030.185	14.272.099.825	11.274.963.216	13.032.504.344	13.004.009.985	14.930.918.043	11.812.739.785	95,17	107,12	84,96	110,59	82,77	4,09	0,95
<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	11.441.115.466	11.725.605.329	14.803.476.460	12.740.333.785	13.435.333.785	10.804.281.216	12.364.337.344	12.243.333.785	14.359.262.193	11.400.192.835	94,43	105,45	82,71	112,71	84,85	3,49	1,10
<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	212.711.400	241.053.417	263.475.352	342.078.100	376.285.910	246.500.400	235.002.900	316.878.100	316.083.600	201.714.700	115,88	97,49	120,27	92,40	53,61	15,38	3,63
<i>Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	169.372.500	171.939.971	209.793.547	219.662.700	241.628.970	194.872.300	214.449.700	258.662.700	223.923.250	178.923.250	115,06	124,72	123,29	101,94	74,05	8,53	1,64
<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>	2.974.800	3.371.167	3.684.741	30.208.600	33.229.460	2.974.800	30.207.400	30.208.600	30.173.600	30.173.600	100,00	896,05	819,83	99,88	90,80	203,41	182,86
<i>Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan</i>	21.346.500	24.190.743	26.440.880	168.747.000	185.621.700	26.334.500	188.507.000	154.926.800	1.475.400	1.735.400	123,37	779,25	585,94	0,87	0,93	153,91	18,68
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19.825.000	22.466.516	24.556.271	18.475.000	20.322.500	19.825.000	19.825.000	18.475.000	37.962.000	13.152.000	100,00	88,24	75,24	205,48	64,72	0,50	- 6,73
<i>Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>	1.625.000	1.841.518	2.012.809	2.010.000	2.211.000	1.625.000	1.625.000	2.010.000	3.531.000	3.761.000	100,00	88,24	99,86	175,67	170,10	7,21	26,29
<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	6.125.000	6.941.105	7.586.742	7.475.000	8.222.500	6.125.000	6.125.000	7.475.000	4.521.000	4.751.000	100,00	88,24	98,53	60,48	57,78	6,85	4,49
<i>Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>	12.075.000	13.683.893	14.956.720	8.990.000	9.889.000	12.075.000	12.075.000	8.990.000	29.910.000	4.640.000	100,00	88,24	60,11	332,70	46,92	- 3,62	- 12,31
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	279.643.200	328.903.321	363.180.545	943.995.900	1.037.095.490	168.938.800	1.306.368.000	889.023.900	1.460.323.700	261.980.200	60,41	397,19	244,79	154,70	25,26	54,17	11,01
<i>Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i>	60.155.400	68.170.605	74.511.593	433.746.200	477.120.820	69.452.000	366.952.000	433.746.200	470.250.000	30.051.000	115,45	538,28	582,12	108,42	6,30	138,63	11,35
<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	-	6.000.000	8.400.000	53.617.500	58.979.250	-	742.150.000	53.617.500	750.604.500	-	#DIV/0!	12.369,17	638,30	1.399,92	-	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	29.486.800	33.415.670	36.523.877	189.782.200	208.760.420	29.486.800	69.266.000	232.660.200	39.959.200	22.929.200	100,00	207,29	637,01	21,06	10,98	121,60	4,45
<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	-	6.000.000	8.400.000	40.000.000	45.000.000	-	-	-	22.000.000	40.000.000	#DIV/0!	-	-	55,00	88,89	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	25.001.000	28.332.174	30.967.533	23.000.000	23.000.000	-	25.000.000	-	-	-	-	88,24	-	-	-	- 1,60	#DIV/0!
<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	165.000.000	186.984.872	204.377.542	203.850.000	224.235.000	70.000.000	103.000.000	169.000.000	177.510.000	169.000.000	42,42	55,08	82,69	87,08	75,37	7,18	28,29
Administrasi Umum Perangkat Daerah	908.391.000	986.080.908	1.125.180.121	3.451.664.580	3.796.831.038	1.196.268.400	4.549.289.940	4.650.038.630	5.764.775.050	3.467.893.855	131,69	461,35	413,27	167,01	91,34	63,59	37,98
<i>Penyediaan Komponen Instalasi</i>	93.390.000	105.833.437	115.677.689	118.460.000	130.306.000	93.390.000	131.208.000	127.410.000	72.680.000	72.680.000	100,00	123,98	110,14	61,35	55,78	7,91	4,44

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	83.967.000	95.154.901	104.005.873	337.662.600	371.428.860	202.842.000	937.023.650	351.053.100	629.229.650	276.207.155	241,57	984,74	337,53	186,35	74,36	68,47	7,23
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.700	159.987.040	185.798.633	228.964.980	251.861.478	201.318.500	150.715.740	263.796.530	267.240.300	301.345.600	134,21	94,20	141,98	116,72	119,65	13,58	9,94
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	65.004.400	73.665.693	80.517.815	102.788.000	113.066.800	65.004.400	56.700.000	102.788.000	102.788.000	162.303.000	100,00	76,97	127,66	100,00	143,55	14,79	29,94
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	206.480.000	213.991.735	255.756.818	173.980.000	191.378.000	206.480.000	179.380.000	173.980.000	170.680.000	133.030.000	100,00	83,83	68,03	98,10	69,51	-	-
Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.368.000	113.741.198	124.321.001	1.550.000.00	1.705.000.00	199.500.000	2.030.250.00	2.253.500.00	2.631.100.00	1.461.730.00	198,77	1.784,97	1.812,65	169,75	85,73	319,75	126,54
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	34.070.000	38.609.543	42.200.866	715.700.000	787.270.000	34.070.000	937.202.000	1.196.280.00	1.791.595.00	855.430.000	100,00	2.427,38	2.834,73	250,33	108,66	442,15	482,16
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100.160.900	100.160.900	124.064.476	149.419.000	164.360.900	118.713.500	52.120.550	106.541.000	24.796.100	25.272.100	118,52	52,04	85,88	16,60	15,38	12,82	15,74
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	74.950.000	84.936.461	92.836.950	74.690.000	82.159.000	74.950.000	74.690.000	74.690.000	74.666.000	179.896.000	100,00	87,94	80,45	99,97	218,96	1,92	28,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	484.936.500	1.072.434.828	2.202.672.491	4.416.893.000	2.200.060.207	305.252.600	61.000.000	4.212.373.000	537.529.660	3.399.424.800	62,95	5,69	191,24	12,17	154,52	70,74	202,73
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	700.000.000	1.368.715.842	3.062.930.000	910.700.907	-	-	3.375.000.000	-	2.215.130.000	#DIV/0!	-	246,58	-	243,23	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	30.000.000	355.230.534	76.575.000	84.232.500	-	-	76.575.000	-	-	#DIV/0!	-	21,56	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	200.000.000	10.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- 20,00	#DIV/0!
Pengadaan Mebel	-	188.871.332	224.605.597	186.000.000	204.600.000	-	24.000.000	193.500.000	355.264.660	655.113.800	#DIV/0!	12,71	86,15	191,00	320,19	#DIV/0!	#DIV/0!
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214.726.500	63.998.600	67.784.594	1.091.388.000	1.000.526.800	235.042.600	37.000.000	567.298.000	182.265.000	529.181.000	109,46	57,81	836,91	16,70	52,89	73,19	25,03
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	70.210.000	79.564.896	86.335.924	-	-	70.210.000	-	-	-	0	100,00	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- 20,00	- 20,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.270.769.200	4.270.769.200	4.537.377.161	6.076.341.360	6.683.975.496	4.370.769.200	5.596.738.760	6.148.265.860	6.252.769.520	6.264.310.520	102,34	131,05	135,50	102,90	93,72	11,30	8,66
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.418.000	9.418.000	11.298.356,97	20.875.000	22.962.500,00	9.418.000	27.175.000	20.875.000	78.849.000	194.555.000	100,00	288,54	184,76	377,72	847,27	28,76	393,16
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	737.863.200	737.863.200,00	813.333.419,22	965.089.000	1.061.597.900,00	737.863.200	902.197.200	981.851.500	964.000.000	966.730.000	100,00	122,27	120,72	99,89	91,06	8,77	6,20
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.523.488.000	3.523.488.000,00	3.712.745.384,47	5.090.377.360	5.599.415.096,00	3.623.488.000	4.667.366.560	5.145.539.360	5.209.920.520	5.103.025.520	102,84	132,46	138,59	102,35	91,13	11,78	8,17
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.068.746.000	2.282.036.526	2.454.390.544	4.676.151.119	2.951.369.300	2.432.471.340	1.898.151.000	2.623.183.000	2.058.082.000	8.838.094.208	117,58	83,18	106,88	44,01	299,46	8,53	52,67
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	167.600.000	167.600.000,00	186.204.396,22	167.600.000	184.360.000,00	167.600.000	167.600.000	167.600.000	167.600.000	192.600.000	100,00	100,00	90,01	100,00	104,47	2,00	2,98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.198.060.000	1.198.060.000,00	1.231.050.352	666.160.000	732.776.000	1.198.060.000	696.706.000	673.780.000	730.470.000	705.470.000	100,00	58,15	54,73	109,65	96,27	- 7,77	- 8,22
Pemeliharaan Mebel	25.000.000	25.000.000	27.775.119	27.500.000	30.250.000	25.000.000	12.500.000	27.500.000	17.500.000	17.500.000	100,00	50,00	99,01	63,64	57,85	4,20	- 6,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	350.300.000	350.300.000	389.184.964	417.358.000	459.093.800	350.300.000	234.150.000	349.858.000	355.446.000	310.796.000	100,00	66,84	89,90	85,17	67,70	6,21	- 2,26
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	12.500.000	12.500.000	13.887.559	35.000.000	38.500.000	25.000.000	787.195.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	200,00	6.297,56	252,02	100,00	90,91	41,60	8,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	315.286.000	271.281.300	311.611.547	3.362.533.119	1.506.389.500	666.511.340	-	1.369.445.000	752.066.000	7.576.728.208	211,40	-	439,47	22,37	502,97	75,56	207,35
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	257.295.226	294.676.607	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	34.909.203.571	40.960.563.331	42.473.097.432	44.309.253.080	44.889.853.080	40.899.203.571	42.315.913.096	42.839.253.080	41.721.238.426	43.416.059.360	117,16	103,31	100,86	94,16	96,72	5,72	1,23
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	34.909.203.571	39.560.563.331	40.929.614.114	43.503.253.080	44.003.253.080	40.509.203.571	41.925.913.096	42.303.253.080	41.113.488.426	42.128.309.360	116,04	105,98	103,36	94,51	95,74	5,21	0,80
Penyediaan Pakaitan Dinas dan Atribut DPRD	-	1.110.000.000	1.219.106.418	416.000.000	457.600.000	390.000.000	0	416.000.000	607.750.000	897.750.000	#DIV/0!	-	34,12	146,09	196,19	#DIV/0!	26,04
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	-	290.000.000	324.376.900	390.000.000	429.000.000	0	390.000.000	120.000.000	-	390.000.000	#DIV/0!	134,48	36,99	-	90,91	#DIV/0!	#DIV/0!
Layanan Administrasi DPRD	973.910.500	1.103.675.938	1.190.233.424	947.105.500	1.007.536.031	1.400.611.800	809.798.850	885.205.500	879.814.820	739.804.520	143,81	73,37	74,37	92,90	73,43	0,69	- 9,44
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotan DPRD	-	-	-	68.000.000	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Fasilitasi Fraksi DPRD	60.005.100	68.000.278	73.333.305	304.727.100	300.719.791	122.632.400	198.740.700	304.727.100	311.184.220	229.520.720	204,37	292,26	415,54	102,12	-	80,23	17,43
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	488.175.400	553.220.694	596.607.879	154.378.400	169.816.240	589.416.400	154.364.800	160.478.400	148.630.600	90.283.800	120,74	27,90	26,90	96,28	-	- 13,04	- 16,94
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	425.730.000	482.454.966	520.292.240	420.000.000	462.000.000	688.563.000	456.693.350	420.000.000	420.000.000	420.000.000	161,74	94,66	80,72	100,00	-	1,70	- 7,80
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN	42.897.113.800	48.612.597.002	53.597.999.999	49.120.214.981	40.841.250.548	49.421.565.795	58.042.944.551	58.906.488.750	55.857.183.420	64.487.329.060	115,21	119,40	109,90	113,72	157,90	- 0,96	6,10

RENSIRA Sekretariat DPRD Provinsi NTB 2025-2029

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGAR AN	REALI SASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
TUGAS DAN FUNGSI DPRD																	
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	3.132.536.800	3.535.354.861	3.895.967.790	4.909.930.300	5.095.923.330	7.244.596.200	12.619.972.300	1.563.666.300	1.541.334.500	12.991.063.600	231,27	356,96	40,14	31,39	254,93	12,54	15,86
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	344.602.300	344.602.300	413.404.098	770.666.800	847.733.480	609.150.800	761.222.800	770.666.800	-	-	176,77	220,90	186,42	-	-	29,20	-20,00
Pembahasan Rancangan Perda	354.746.000	354.746.000	425.573.045	264.861.500	291.347.650	433.569.400	313.911.500	468.597.500	293.218.500	186.379.500	122,22	88,49	110,11	110,71	63,97	-3,57	-11,40
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	2.110.968.500	2.510.968.500	2.719.612.834	3.450.000.000	3.500.000.000	5.929.656.000	11.222.968.000	-	1.213.336.000	12.768.908.000	280,90	446,96	-	35,17	364,83	13,16	23,07
Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	301.070.000	301.070.000	311.180.328	301.552.000	331.707.200	251.070.000	301.320.000	301.552.000	-	-	83,39	100,08	96,91	-	-	2,04	-20,00
Penyusunan Tata Tertib DPRD	21.150.000	23.968.061	26.197.485	22.850.000	25.135.000	21.150.000	20.550.000	22.850.000	34.780.000	35.776.100	100,00	85,74	87,22	152,21	142,34	3,77	13,83
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembahasan Kebijakan Anggaran	679.505.900	769.641.386	835.575.696	1.359.581.000	1.495.539.100	708.406.300	988.010.000	1.311.176.000	654.466.200	1.429.768.500	104,25	128,37	156,92	48,14	95,60	24,02	20,37
Pembahasan KUA dan PPAS	150.008.500	169.995.880	184.462.647	405.747.500	446.322.250	250.567.500	379.717.500	393.017.500	92.966.200	420.998.500	167,04	223,37	213,06	22,91	94,33	39,51	13,60
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	163.574.500	184.966.436	201.144.503	364.984.500	401.482.950	143.434.500	155.684.500	219.139.500	92.609.000	382.108.500	87,69	84,17	108,95	25,37	95,17	29,09	33,28
Pembahasan APBD	149.946.300	169.925.392	184.386.160	186.777.000	205.454.700	149.725.500	143.587.000	228.687.000	142.801.000	199.393.500	99,85	84,50	124,03	76,46	97,05	7,40	6,63
Pembahasan Perubahan APBD	107.988.300	122.376.839	132.791.193	243.381.000	267.719.100	111.060.500	193.960.500	311.641.000	203.509.000	250.779.000	102,84	158,49	234,68	83,62	93,67	29,58	25,16
Pembahasan Laporan Semester	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	107.988.300	122.376.839	132.791.193	158.691.000	174.560.100	53.618.300	115.060.500	158.691.000	122.581.000	176.489.000	49,65	94,02	119,50	77,25	101,11	12,33	45,83
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	308.681.800	308.681.800	460.054.931	566.694.400	638.363.840	636.799.095	414.604.900	459.934.700	608.583.570	606.433.660	206,30	134,31	99,97	107,39	95,00	21,36	-0,95
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	81.208.400	89.329.240,00	257.848.495	80.022.500	86.208.400	125.118.500	311.093.550	515,67	160,04	110,07	154,07	348,26	15,73	4,13
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	96.620.100	106.282.110,00	70.070.700	93.930.700	86.620.500	118.123.170	72.573.170	140,13	187,85	110,59	122,26	68,28	22,51	0,71
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	91.625.300	100.787.830,00	70.070.700	81.187.500	81.622.000	130.477.330	73.732.370	140,13	162,37	104,21	142,40	73,16	20,31	1,05
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	73.620.300	80.982.330,00	70.070.700	87.051.700	103.628.500	118.123.170	72.573.170	140,13	174,09	132,31	160,45	89,62	12,39	0,71
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	50.002.800	50.002.800,00	78.324.639,51	73.620.300	80.982.330,00	70.070.700	72.412.500	101.855.300	116.741.400	76.461.400	140,13	144,82	130,04	158,57	94,42	12,39	1,82

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	58.667.800	58.667.800,00	68.431.733,54	-	-	98.667.800	-	-	-	-	168,18	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	- 20,00	- 20,00
Pengawasan Penggunaan Anggaran	-	-	-	120.000.000	140.000.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	-	-	-	30.000.000	40.000.000,00	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Peningkatan Kapasitas DPRD	4.579.091.400	4.179.091.400	4.944.839.124	6.094.588.600	6.704.047.460	4.205.047.500	6.039.983.800	7.209.687.700	4.690.744.800	5.087.548.200	91,83	144,53	145,80	76,97	75,89	9,28	4,20
Orientasi DPRD	0	0	0	400.000.000	440.000.000	0	0	0	1.097.931.600	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	274,48	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Bimbingan Teknis/Pendalaman Tugas DPRD	2.009.777.100	1.809.777.100	2.068.121.150	3.242.567.800	3.566.824.580	1.201.663.800	2.811.615.900	4.372.991.900	987.799.500	3.116.504.500	59,79	155,36	211,45	30,46	87,37	15,49	31,87
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	425.580.000	425.580.000	510.549.454	446.180.000	490.798.000	474.180.000	513.480.000	681.155.000	789.400.000	374.300.000	111,42	120,65	133,42	176,92	76,26	3,06	- 4,21
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	360.995.100	360.995.100	433.069.814	455.702.400	501.272.640	460.761.600	436.101.600	455.702.400	454.760.200	456.960.200	127,64	120,81	105,23	99,79	91,16	7,77	0,17
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	62.448.000	62.448.000	74.916.096	108.660.000	119.526.000	62.448.000	132.448.000	154.410.000	25.500.000	58.730.000	100,00	212,09	206,11	23,47	49,14	18,28	- 1,19
Penyusunan Program Kerja DPRD	475.209.900	475.209.900	570.088.244	59.977.900	65.975.690	167.728.800	44.018.500	59.977.900	14.298.500	22.123.500	35,30	9,26	10,52	23,84	33,53	- 17,22	- 17,36
Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.245.081.300	1.045.081.300	1.288.094.366	1.381.500.500	1.519.650.550	1.838.265.300	2.102.319.800	1.485.450.500	1.321.055.000	1.058.930.000	147,64	201,16	115,32	95,62	69,68	4,41	- 8,48
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	20.829.849.000	25.917.854.179	29.149.361.722	26.432.469.100	16.171.556.505	29.863.348.600	28.798.305.551	35.683.464.350	26.640.116.150	25.140.778.150	143,37	111,11	122,42	100,79	155,46	- 4,47	- 3,16
Kunjungan Kerja dalam Daerah	6.259.050.000	8.093.016.127	10.322.283.417	8.202.200.000	8.202.200.000	8.468.550.000	7.256.912.651	8.828.799.750	8.753.600.000	7.002.610.000	135,30	89,67	85,53	106,72	85,37	6,21	- 3,46
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	120.299.000	136.327.837	149.008.569	308.198.000	339.017.800	161.149.000	97.048.000	268.148.000	64.555.000	515.847.000	133,96	71,19	179,95	20,95	152,16	36,36	44,02
Pelaksanaan Reses	14.450.500.000	17.688.510.215	18.678.069.736	17.822.071.100	7.530.338.705	21.233.649.600	21.444.344.900	26.586.516.600	17.821.961.150	17.622.321.150	146,94	121,23	142,34	100,00	234,02	- 9,58	- 3,40
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	-	-	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	33.206.400	37.630.876	41.131.166	36.308.300	39.939.130	14.901.400	38.477.200	31.828.300	68.953.800	50.108.950	44,88	102,25	77,38	189,91	125,46	4,06	47,25
Penyusunan Kode Etik DPRD	15.004.300	17.003.498	18.585.103	28.846.400	31.731.040	8.195.800	28.848.900	24.366.400	39.861.400	28.914.950	54,62	169,66	131,11	138,19	91,13	22,30	50,56
Pengawasan Kode Etik DPRD	18.202.100	20.627.378	22.546.063	7.461.900	8.208.090	6.705.600	9.628.300	7.461.900	29.092.400	21.194.000	36,84	46,68	33,10	389,88	258,21	- 10,98	43,21
Fasilitasi Tugas DPRD	13.334.242.500	13.864.342.500	14.271.069.570	9.720.643.281	10.695.881.184	6.748.466.700	9.143.590.800	12.646.731.400	21.652.984.400	19.181.628.000	50,61	65,95	88,62	222,75	179,34	- 3,96	36,85
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	12.000.550.000	12.000.550.000	12.320.557.920	8.713.266.881	9.687.872.144	4.239.950.000	8.405.165.000	11.833.050.000	20.654.400.000	18.037.730.000	35,33	70,04	96,04	237,05	186,19	- 3,85	65,08
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	11.530.500	11.530.500	13.832.630	10.675.000	11.742.500	11.530.500	11.530.500	10.675.000	-	192.000.000	100,00	100,00	77,17	-	1.635,09	0,37	313,03

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE-					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE-					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE-					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025*	2021	2022	2023	2024	2025	ANGGAR AN	REALI SASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	122.162.000	122.162.000	136.525.279	81.832.100	90.015.310	114.748.600	98.787.100	81.832.100	78.556.500	124.787.100	93,93	80,87	59,94	96,00	138,63	- 5,26	1,75
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1.200.000.000	1.730.100.000	1.800.153.741	706.174.300	776.791.730	2.382.237.600	628.108.200	721.174.300	920.027.900	827.110.900	198,52	36,30	40,06	130,28	106,48	- 7,05	- 13,06
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	-	-	-	208.695.000	129.459.499	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
JUMLAH TOTAL	98.949.800.537	112.134.034.879	123.634.047.293	128.068.436.605	118.368.436.605	111.863.913.822	128.177.831.741	134.758.436.605	130.077.038.339	143.308.935.508	113,05	114,31	109,00	101,57	121,07	3,92	5,62

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025 Catatan *: Angka Sementara

Pada Tabel 2.10 capaian kinerja anggaran Sekretariat DPRD pada Tahun 2021-2025 menunjukkan realisasi anggaran Sekretariat DPRD NTB pada program prioritas dan rutin secara konsisten melebihi target, didorong oleh tingginya kebutuhan kegiatan dan dinamika tugas fasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Kelompok sasaran layanan perangkat daerah adalah kelompok masyarakat yang menerima manfaat langsung dari layanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Kelompok sasaran ini biasanya ditentukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing perangkat daerah. Kelompok Sasaran merupakan salah satu elemen penting dalam penyusunan Renstra perangkat daerah. Kelompok sasaran layanan Sekretariat DPRD (Setwan) adalah Pimpinan dan anggota DPRD serta masyarakat secara umum yang membutuhkan informasi dan layanan terkait DPRD. Setwan memainkan peranan yang penting dalam mendukung fungsi DPRD dan memberikan pelayanan kepada semua pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal serta bertanggung jawab untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD, memberikan pelayanan administrasi, keuangan, dan tenaga ahli, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2.1.5 Mitra Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam pemberian pelayanan

Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRD Provinsi NTB, kolaborasi juga dilakukan dengan beberapa perangkat daerah/lembaga/stakeholder lainnya pada penyelenggaraan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan di Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Kolaborasi/kemitraan tersebut dapat dilihat pada tabel 2.11 dibawah ini:

Tabel 2.11

Kolaborasi/kemitraan Kegiatan, Subkegiatan pada Sekretariat DPRD NTB

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KOLABORASI/ KEMITRAAN	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah pembentukan Perda dan peraturan DPRD yang difasilitasi	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Sub Kegiatan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Biro Hukum dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
2	Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Sub Kegiatan Pembahasan KUA dan PPAS	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan	Jumlah Dokumen	Sub Kegiatan Pembahasan	TAPD (Bappeda,	

NO	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KOLABORASI/ KEMITRAAN	KET.
1	2	3	4	5	6
	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	<i>Perubahan KUA dan Perubahan PPAS</i>	BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	<i>Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD</i>	TAPD (Bappeda, BPKAD , Bappenda)	
3	Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	46 OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-1 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-4 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-5 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-2 dan 3 DPRD NTB	
	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	<i>Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>	OPD Lingkup Provinsi NTB Mitra Komisi-4 DPRD NTB	
4	Meningkatnya Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Masyarakat, Toga, Toma, Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB	
	Terlaksananya Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD</i>	Bappeda dan OPD Lingkup Provinsi NTB	
	Terlaksananya Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses</i>	Masyarakat, Toga, Toma, Pemerintah Kabupaten dan Kota di NTB	

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2024

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekretariat DPRD mempunyai tugas yaitu Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan analisis struktur, tugas, fungsi serta gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB pada BAB II, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah **“Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Layanan dan Kinerja Lembaga Legislatif”**.

Permasalahan utama tersebut disebabkan oleh beberapa aspek sebagai berikut:

✓ **Aspek Sumber Daya Manusia**

- 1) Aspek Sumber Daya Manusia merupakan aspek yang paling penting. Di sisi sumber daya manusia, jumlah sumber daya manusia yang cukup besar terdiri atas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah Non ASN, Tenaga Ahli, dan Staf Administrasi Anggota merupakan salah sumber daya untuk meningkatkan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pembagian tugas yang jelas dan terarah sehingga produktifitas meningkat. Namun, besarnya jumlah sumber daya manusia tersebut dapat menjadi masalah apabila dihubungkan dengan tingkat pendidikan dan usia. Tingkat Pendidikan PNS pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2024, dengan tingkat pendidikan Diploma ke Atas mencapai $\pm 56,30\%$ dan Golongan I dan II mencapai $\pm 32,77\%$. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Adapun usia berpengaruh terhadap penerimaan atas perubahan dan perkembangan teknologi, hal yang sangat berperan dalam perkembangan organisasi Sumber daya Manusia Kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
- 2) Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 3) Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing.

✓ **Aspek kelembagaan**

Permasalahan dalam aspek kelembagaan merupakan permasalahan yang bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena organisasi Setwan diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan, permasalahan

kelembagaan adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretariat DPRD Provinsi NTB merupakan *supportingsystem* Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB, Lembaga legislative yang berperan dalam menentukan berbagai kebijakan di Provinsi NTB. Sekretariat DPRD Provinsi NTB dapat memanfaatkan dukungan DPRD Provinsi NTB untuk meningkatkan dan mempercepat kinerjanya. Namun demikian Sekretariat DPRD Provinsi NTB meskipun dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD Provinsi NTB, tidak dapat melepaskan dirinya sebagai aparatur pemerintah yang harus mengikuti ketentuan dan kebijakan pemerintah yang kadangkala bersinggungan dengan kebijakan DPRD Provinsi NTB.
- 2) Belum optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.
- 3) Aspek lainnya adalah Struktur Organisasi Kelembagaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang perlu ditinjau kembali agar ada kesesuaian antara tugas fungsi dengan bagian lainnya.

✓ Aspek Sarana Prasarana.

Beberapa hal yang masih menjadi masalah pada aspek sarana dan prasarana adalah :

- 1) Masih perlu penataan lingkungan kantor dan ruangan, khususnya penataan ruang rapat, halaman, pagar Sekretariat DPRD dan pengadaan fasilitas eskalator untuk mempermudah mobilitas vertikal di gedung bertingkat, namun yang tak kalah penting adalah perlunya rehabilitasi gedung lama untuk memastikan keandalan struktur, keselamatan pengguna dan pemenuhan standart lingkungan. Rehabilitasi dan Pembangunan gedung kantor yang memadai baik dari segi fasilitas maupun lingkungan untuk mendukung efektifitas dan kualitas layanan publik dalam mendukung kegiatan peningkatan produktivitas dan kinerja aparatur negara sehingga kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efisien.
- 2) Banyak sarana kerja yang sudah saatnya diperbaharui, seperti mebeulair, kendaraan dinas/operasional, sound system dan voice recorder.
- 3) Belum tersedianya area merokok, jalur khusus disabilitas, ruang menyusui, tempat penitipan anak, ruang medis dan ambulance.

Tabel 2.12
Rumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jadwal Pembahasan KUA, KUPA Dan PPAS Terlambat dan Belum Dapat Dilaksanakan Tepat Waktu	Lama Turunnya Hasil Evaluasi Kemendagri (Proses Fasilitasi Kementerian Dalam Negeri RI Yang Cukup Lama)	Terlambatnya Penetapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Perubahan APBD Dan Penetapan APBD
		Pembahasan Antara Eksekutif dan Legislatif Deadlock dan Berlarut Larut	Tertundanya Pembahasan Atau Molornya Waktu Pembahasan
		Perubahan Jadwal Rapat Anggota Dewan	Lamanya Proses Pembahasan Baik Ditingkat SKPD (Eksekutif) Maupun Ditingkat Legislatif
2	Cepatnya Perubahan Instrument Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Sering Berubah-Ubahnya Peraturan Dari Pemerintah Pusat	Regulasi Terkait Pelaksanaan Tupoksi Selalu Berubah Ubah	Adanya Regulasi dan Kebijakan Yang Tidak Selaras Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Diberlakukan
		Draft Raperda dan Naskah Akademik Yang Belum Tuntas	Dokumen Pendukung Raperda Kurang Lengkap
		Keterlambatan Pelaksanaan Rapat	Proses Pengambilan Kebijakan Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan
		Tingginya Frekuensi Kerja Insidentil	Tidak Tercapainya Target Pembahasan Raperda
3	Belum Optimalnya Peran Lembaga DPRD Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya Yakni Fungsinya Pembentukan Perda, Penganggaran Dan Pengawasan		Pelaksanaan Kegiatan DPRD Yang Sifatnya Tidak Terjadwal Menyebabkan Kurangnya Koordinasi Dalam Pelaksanaannya
		Semakin Besarnya Volume Kegiatan DPRD Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Sebagai Lembaga Perwakilan	Dinamika Politik Yang Selalu Berubah Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Fungsi Sekretariat DPRD
		Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Mengimbangi Kemajuan Teknologi Informasi dan Deteksi Dini Terhadap Perubahan-Perubahan Atas Peraturan Perundangan	Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana Pendukung Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		Rendahnya Tingkat Kehadiran Anggota Pansus	Masih Lemahnya Pemahaman Anggota DPRD Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya
		Tingginya Standart Pelayanan Yang Dibutuhkan DPRD	Saran Dan Rekomendasi Perbaikan Untuk Peningkatan Pelayanan Sekretariat DPRD NTB Belum Ada Karena Belum Dilakukannya Evaluasi
		Kurangnya Disiplin dan Motivasi Kerja	Ketidakdisiplinan Dalam Menghadiri Rapat
4.	Menurunnya Indeks Kinerja Lembaga Legislatif	Minimnya Ruang Partisipasi Publik Dalam Setiap Pembahasan Raperda dsb	Kepercayaan Publik Terhadap DPRD Yang Semakin Rendah/Menurun
		Dinamika Politik Yang Selalu Berubah Mempengaruhi Pelaksanaan Pelaksaasn Tugas Fungsi Sekretariat DPRD	
		Makin Tingginya Tuntutan Terhadap Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Rangka Optimalisasi Fasilitasi dan Dukungan Penyelenggaraan Tugas-Tugas Kedewanan Secara Berkesinambungan.	

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
		Cepatnya Perubahan Instrument Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dengan Sering Berubah-Ubahnya Peraturan-Peraturan Dari Pemerintah Pusat.	

2.2.2 Isu Strategis

✓ Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia Emas Tahun 2045 merupakan langkah pemerintah dalam membangun Indonesia untuk menjadi Megatrend Dunia yang semakin sarat akan persaingan yang sangat ketat. Pemerintah dalam mewujudkan hal tersebut membangun pilar Visi Indonesia 2045 sebagai bahan acuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian menjadi acuan setiap langkah pemerintah dalam menjalankan roda

pemerintahan. Pencapaian impian dan visi Indonesia 2045 dibangun dengan 4 pilar berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa, bernegara dan konstitusi.

4 Pilar Visi Indonesia 2045 tersebut yaitu:

1. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
2. Pemerataan Pembangunan
3. Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola

Tujuan utama 4 Pilar Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, dan berkelanjutan dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, ekonomi yang kuat dan inklusif, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pemerintah Provinsi memegang peran penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 melalui 4 pilar utama yakni pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Dengan menjalankan perannya secara efektif dalam keempat pilar ini, pemerintah provinsi dapat berkontribusi besar dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara yang maju, sejahtera, dan berdaya saing global.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai Perangkat Daerah Provinsi mendukung Pemerintah Provinsi NTB menuju Indonesia Emas 2045. Peran ini meliputi pelaksanaan program-program pembangunan yang selaras dengan visi NTB Emas, serta penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang selaras dengan RPJPN dengan kontribusi yang terpadu dan kolaboratif melalui penyusunan Renstra dengan memperhatikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan wilayah, nasional dan sektoral dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi dan karakteristik daerah sesuai prinsip otonomi daerah, agar apa yang diupayakan Pemerintah Daerah dapat sejalan dengan upaya pemerintah Pusat demi sebesar-besarnya kemanfaatan bagi masyarakat.

Meski Sekretariat DPRD Provinsi NTB bukan merupakan lembaga teknis daerah yang tidak terdapat tugas dan fungsi yang berhubungan langsung dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian/Lembaga Teknis di Pemerintah Pusat serta tidak secara langsung berhubungan dengan rencana strategis kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut, Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 tidak menjabarkan Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota.

✓ **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2024-2044. Tujuan penataan ruang wilayah provinsi adalah mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui penataan ruang secara serasi, seimbang, terpadu dan berkelanjutan dalam rangka mendorong wilayah provinsi sebagai kawasan pengembangan agrobisnis dan pariwisata untuk meningkatkan daya saing daerah dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam.

Berbagai potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Provinsi NTB haruslah bisa memberikan kemanfaatan dan kesejahteraan bagi masyarakat NTB. Untuk itu Pemerintah Provinsi NTB telah menetapkan RTRW Provinsi NTB 2024-2044 dalam upaya pemanfaatan potensi sumber daya alami yang dimiliki agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sebagai Perangkat Daerah yang memfasilitasi koordinasi antara pihak legislatif dengan eksekutif, Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat hadir dalam mengawal kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan dalam RTRW dan perubahannya berdasarkan hasil

KLHS.

Faktor-faktor penentu keberhasilan merupakan faktor yang sangat penting dalam penetapan pencapaian keberhasilan organisasi. Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis faktor lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan SWOT analisis, selanjutnya dengan menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritas.

Ilustrasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam menjalankan fasilitasi dan dukungan pada Anggota DPRD Provinsi NTB, bisa digambarkan melalui fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kedewanan yang menjadi bidang tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB serta dipengaruhi faktor-faktor lingkungan dan isu-isu strategis yang terkait proses demokratisasi dan desentralisasi. Hal tersebut juga dipengaruhi pesatnya perkembangan teknologi informasi sebagai dinamika kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya, adapun dampaknya berpengaruh pada :

- 1) Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik.
- 2) Meningkatnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, ketaatan pada hukum dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan ilustrasi diatas, maka dapat diprediksikan kondisi organisasi Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama beberapa waktu kedepan dengan kondisi internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan:

a. Kekuatan (*strengths*)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategis antara lain :

- 1) Eksistensi lembaga Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bagian integral dari manajemen penyelenggaraan pemerintahan daerah, merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan;
- 2) Tersedianya anggaran yang cukup memadai.
- 3) Tersedianya Tata Tertib DPRD Provinsi NTB berdasarkan Peraturan DPRD yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

- 4) Terjalannya hubungan yang harmonis antara Sekretariat DPRD dengan DPRD
- 5) Dukungan kebijakan dan komitmen organisasi dalam pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM aparatur Sekretariat DPRD.
- 6) Komitmen DPRD untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah.

b. Kelemahan (*weaknesses*)

Pada sisi kelemahan, terdapat faktor-faktor yaitu :

- 1) Kompetensi sumber daya aparatur yang belum optimal dari segi kualitas dalam mengimbangi kemajuan teknologi dan deteksi dini terhadap perubahan regulasi.
- 2) Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
- 3) Beban Kerja Sekretariat DPRD yang tidak merata serta ASN yang belum memahami tupoksi masing masing.
- 4) Kurangnya disiplin dan motivasi kerja ASN.
- 5) Tingginya Frekuensi Kerja Insidentil dan Standard Pelayanan yang dibutuhkan DPRD NTB.
- 6) Aparatur Sipil Negara yang belum memahami tupoksi masing masing.
- 7) Belum Optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan :

a. Peluang (*Opportunities*)

Pada sisi peluang, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam hal penyediaan kegiatan diklat dan peningkatan kapasitas.
- 2) Tingginya antusiasme dan aspirasi masyarakat dalam mendukung kebijakan Pemerintah yang diserap melalui kegiatan Hearing dan Reses.
- 3) Terjalannya hubungan yang harmonis antara Eksekutif dan Legislatif.
- 4) Penggunaan Teknologi Informasi yang semakin berkembang.
- 5) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis.

b. Tantangan/ancaman/hambatan (*Threats*)

Pada sisi tantangan/ancaman/hambatan, terdapat faktor-faktor strategis antara lain:

- 1) Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah

- dengansering berubah-ubahnya peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat;
- 2) Tngginya tuntutan profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam mendukung pelayanan fasilitasi tugas DPRD;
 - 3) Pelaksanaan kegiatan DPRD yang sifatnya insidental menyebabkan kurangnya koordinasi dalam pelaksanaannya.
 - 4) Besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Lembaga Perwakilan.
 - 5) Regulasi terkait pelaksanaan tupoksi selalu berubah ubah.
 - 6) Dinamika politik yang selalu berubah mempengaruhi pelaksanaan tugas fungsi Sekretariat DPRD.

Meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan publik dan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh penyelenggara pemerintahan daerah utamanya bagi institusi/lembaga DPRD sebagai Lembaga Wakil Rakyat.

Dengan mengoptimalkan kekuatan, memanfaatkan peluang serta meminimalisir kelemahan dan ancaman, maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB akan mengupayakan terwujudnya tujuan- tujuan yang akan dicapai pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

a. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2023 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan, dengan menyelenggarakan empat fungsi yaitu penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD, fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD, penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Keberhasilan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan dukungan dari berbagai unsur. Peningkatan pelayanan kepada DPRD tidak terlepas dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Provinsi NTB. Beberapa permasalahan utama yang menghambat dalam pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai berikut:

1. Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
2. Belum Optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan.
3. Cepatnya perubahan instrument penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya regulasi dari Pemerintah Pusat.
4. Lemahnya atau Menurunnya Nilai/Indeks Kinerja Lembaga Legislative.
5. Pengelolaan Administrasi dan Dokumentasi belum terintegrasi secara digital.

Berdasarkan permasalahan utama tersebut maka dirumuskan Isu Strategis dalam upaya peningkatan pelayanan kepada DPRD yaitu:

“ Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Layanan dan Kinerja Lembaga Legislatif”.

Tabel 2.13
Isu strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatkan kapasitas Sekretariat dalam isu keberlanjutan	1.Ketersediaan sumber daya aparatur yang belum optimal baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Kapasitas dukungan Sekretariat dalam penyusunan regulasi yang responsif terhadap krisis lingkungan dan perubahan iklim	1. Geopolitik dan Geoekonomi 2. Perlemahan ekonomi China 3. Kebijakan Proteksionisme Amerika Serikat 4. Dampak Perubahan Iklim Global	1. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat 2. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif 3. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia 4. Rendahnya Produktifitas 5. Krisis Lingkungan 6. Geopolitik dan Geoekonomi 7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	1. TPT seluruh Provinsi telah lebih rendah dari capaian nasional 2. Kesejahteraan Bali lebih baik dari Nusa Tenggara 3. Kondisi Kemiskinan masih tinggi di NTB dan NTT 4. NTB dan NTT memiliki IPM lebih rendah dari Nasional 5. Kualitas SDM rendah juga disebabkan oleh tingginya prevalensi stunting 6. Perekonomian wilayah Bali-Nusa Tenggara ,mengalami perlambatan 7. Isu kesenjangan antar wilayah masih terjadi di Provinsi NTB dan NTT 8. Wilayah Bali-	BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
					Nusra memiliki indeks resiko bencana kategori sedang namun terdapat potensi bencana karena dilewati beberapa patahan sesar 9. Banyaknya Kawasan konservasi yang berlokasi di sekitar Kawasan pertumbuhan sehingga berpotensi terdampak oleh pengembangan Kawasan Pertumbuhan	
Digitalisasi proses dokumentasi dan pelayanan kesekretariatan	✓ Cepatnya perubahan instrumen penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sering berubah-ubahnya regulasi dari Pemerintah Pusat ✓ Belum Optimalnya peran Lembaga DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yakni fungsinya yakni pembentukan perda, penganggaran dan pengawasan	Penguatan fungsi pengawasan DPRD terhadap program-program pembangunan yang berdampak terhadap lingkungan				
Fasilitasi kegiatan hearing, RDP, dan konsultasi publik yang inklusif	Pengelolaan Administrasi dan Dokumentasi belum terintegrasi secara digital	Efisiensi dan pengelolaan internal kelembagaan secara berkelanjutan (digitalisasi, efisiensi energi, pengelolaan limbah				
Penyusunan naskah akademik perda yang mempertimbangkan	Lemahnya atau Menurunnya Nilai/Indeks Kinerja Lembaga Legislative	Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat				

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
dampak lingkungan		dalam proses pengambilan kebijakan yang berdampak lingkungan				
Kampanye internal green behavior di lingkungan kerja DPRD						

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Sejalan dengan Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 “**Nusa Tenggara Bangkit Bersama Menuju Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia**”, peran dan kontribusi **Sekretariat DPRD Provinsi NTB** secara substantif berada dalam **Misi ke-7**, yaitu

Misi ke- 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Inovatif Serta Kepemimpinan Yang Kolaboratif Dari Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Sebagai Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah (NTB Good & Smart Governance).

Misi yang menitikberatkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, kelembagaan, dan pelayanan publik yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB berfungsi sebagai unsur pendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan. Melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi, fasilitasi kegiatan kedewanan, serta penguatan sistem perencanaan dan akuntabilitas kinerja, Sekretariat DPRD berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional, responsif, dan berintegritas.

Dengan demikian, keberadaan dan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB menjadi bagian integral dari pencapaian Misi ke-7 RPJMD Tahun 2025–2029, sekaligus berkontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang efektif dan demokratis sebagai fondasi menuju NTB yang makmur dan mendunia. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari peran Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam mendukung **Misi ke-7 RPJMD**, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada upaya **mempercepat transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan yang kolaboratif dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagai pondasi percepatan pembangunan daerah.**

Selanjutnya, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029** menetapkan **14 (empat belas) Tujuan Pembangunan Daerah**, dan Sekretariat DPRD Provinsi NTB mendukung Tujuan ke – 14, sebagai berikut:

Tujuan ke-14 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif

3.1. Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 dengan mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah yang terdapat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan memperhatikan Isu strategis dan Permasalahan yang berkaitan dengan pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB.

✓ **Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029**

Mengacu pada Misi ke-7 (TUJUH) yaitu: *"Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Inovatif Serta Kepemimpinan Yang Kolaboratif Dari Pusat, Provinsi Dan Kabupaten/Kota Sebagai Pondasi Percepatan Pembangunan Daerah"* pada RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi NTB memiliki kewajiban untuk turut serta mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), terutama pada Tujuan ke-14 RPJMD, **"Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif"** dengan Indikator: **"INDEKS KETAHANAN NASIONAL"** dan Sasaran ke-24: *"Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas"* dengan indikator : **"INDEKS DEMOKRASI INDONESIA"**. Dalam rangka mencapai **Tujuan ke-14 dan Sasaran ke-24 RPJMD** Provinsi NTB. Sekretariat DPRD Provinsi NTB mendukung Program Unggulan Ke-9: **"NTB Good & SMART Governance"** dan Kegiatan Strategis ke-95: *"Edukasi, Sosialisasi dan Kampanye Literasi Demokrasi dan Penghormatan Hak Azasi Manusia di Lembaga Pendidikan dan Publik"*.

Maka Sekretariat DPRD Provinsi NTB selaku Organisasi Perangkat Daerah Pendukung, menetapkan Tujuan dan Sasaran untuk Tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terwujudnya Peningkatan Kinerja		Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks)	47,34	50,34	53,34	56,34	60,34	63,34

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi		Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan Masyarakat (%)	70,77	73,77	76,77	79,77	82,77	83,77
		Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100	100	100	100
			Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	100	100	100
		Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB, 2025

Renstra yang disusun Sekretariat DPRD berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan indikasi program, kegiatan dan sub kegiatan, sesuai Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Berdasarkan uraian tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menetapkan Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029 sesuai yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB Tahun 2025-2029. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB dengan lingkup temporal 5 (lima) tahun.

Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah menetapkan tujuan, sasaran, Program Unggulan dan Kegiatan Strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD NTB Tahun 2025-2029 sebagaimana diuraikan pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Program Unggulan dan Kegiatan Strategis RPJMD
Provinsi NTB yang Menjadi Pedoman Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN	KEGIATAN STRATEGIS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KE -7 (TUJUH)	Tujuan ke-14 : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif	24. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	✓ Indeks Demokrasi Indonesia	Ke-9 NTB GOOD AND SMART GOVERNANCE	KS 95. Edukasi, Sosialisasi dan Kampanye Literasi Demokrasi dan Penghormatan Hak Azasi Manusia di Lembaga Pendidikan dan Publik

Sumber: RPJMD NTB Tahun 2025-2029

3.2. Sasaran Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung tercapainya **Tujuan-14** pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah NTB yaitu “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif**” dengan **Sasaran-24**: “**Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas**” Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan Tujuan untuk Tahun 2025-2029 yaitu:

“**Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi**”. Untuk mewujudkan tujuan “Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi”, Sekretariat DPRD Provinsi NTB menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. “**Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan**” dan
2. “**Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan**”.

Tabel 3.3 menyajikan hubungan antara tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB, yang dilengkapi dengan indikator-indikator sasaran yang relevan.

Tabel 3.3

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
A	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas			INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) NTB	75,37 - 78,63	76,06 - 79,32	76,75 - 80,00	77,43 - 80,69	78,12 - 81,37	78,81 - 82,06
		Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi		Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks)	47,34	50,34	53,34	56,34	60,34	63,34
				Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan masyarakat (%).	70,77	73,77	76,77	79,77	82,77	83,77
			Meningkatnya Kualitas	Persentase Penetapan	100	100	100	100	100	100

NO	NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan	Ranperda Tahun N (%)						
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

Dalam upaya turut mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 tersebut, Sekretariat DPRD perlu menyusun strategi yang sejalan dengan pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi NTB sebagai perangkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan kepada DPRD. Dengan mempertimbangkan segenap aspek yang terkait dengan Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Hambatan dalam mencapai tujuannya, sebagaimana pada tabel 3.4 dibawah:

Tabel 3.4
Kekuatan, Kelemahan, Tantangan, Peluang Pengembangan Pelayanan
di Sekretariat DPRD Provinsi NTB

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD NTB						
KONDISI INTERNAL		KEKUATAN (STRENGTHS)		KELEMAHAN (WEAKNESSES)	KONDISI INTERNAL	ISU STRATEGIS
S	PENDORONG	1 KOMITMEN DPRD UNTUK Mendukung Kebijakan Pemerintah Daerah	PENGHAMBAT	TINGGINYA FREKUENSI KERJA INSIDENTIL DAN STANDART PELAYANAN YANG DIBUTUHKAN DPRD NTB	W	BELUM OPTIMALNYA PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN DAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF
		2 TERSEDIAANYA TATA TERTIB DPRD PROVINSI NTB YANG Mendukung PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI NTB		BEBAN KERJA SEKRETARIAT DPRD YANG TIDAK MERATA SERTA ASN YANG BELUM MEMAHAMI TUPOKSI MASING MASING		
		3 DUKUNGAN KEBIJAKAN DAN KOMITMEN ORGANISASI DALAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM APARATUR SEKRETARIAT DPRD		KOMPETENSI SUMBER DAYA APARATUR YANG BELUM OPTIMAL DARI SEGI KUALITAS DALAM MENGIMBANGI KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN DETEKSI DINI TERHADAP PERUBAHAN REGULASI		
		4 KETERSEDIAAN SUMBER DAYA APARATUR YANG CUKUP DARI SEGI KUANTITAS		KURANGNYA DISIPLIN DAN MOTIVASI KERJA ASN		
		5 TERJALINNYA HUBUNGAN BAIK (HARMONIS) ANTARA SEKRETARIAT DPRD DENGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD		BELUM OPTIMALNYA KETERSEDIAAN SARANA PENDUKUNG KEGIATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
		6 ADANYA KOMITMEN PIMPINAN SEKRETARIAT DPRD YANG Mendukung ADANYA PENINGKATAN KAPASITAS ASN MAUPUN DPRD				
		7 TERSEDIAANYA ANGGARAN YANG MEMADAI				
		8 PEMANFAATAN TENAGA AHLI DAN KELOMPOK PAKAR DALAM RANGKA Mendukung KINERJA DPRD				

KONDISI EKSTERNAL		PELUANG (OPPORTUNITIES)		TANTANGAN/ANCAMAN/ HAMBATAN (THREATS)	KONDISI EKSTERNAL	
O		1	PENGUNAAN TEKNOLOGI INFORMASI YANG SEMAKIN BERKEMBANG		T	
		2	TINGGINYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENTINGNYA PENYALURAN ASPIRASI SECARA DEMOKRATIS			
		3	TERJALINNYA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF			
		4	TINGGINYA ANTUSIASME DAN ASPIRASI MASYARAKAT DALAM Mendukung KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG DISERAP MELALUI KEGIATAN HEARING DAN RESES			
		5	ADANYA DUKUNGAN DARI PEMERINTAH DAERAH DALAM HAL PENYEDIAAN KEGIATAN DIKLAT DAN PENINGKATAN KAPASITAS			
				REGULASI TERKAIT PELAKSANAAN TUPOKSI SELALU BERUBAH UBAH		
				DINAMIKA POLITIK YANG SELALU BERUBAH MEMPENGARUHI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD		
				BESARNYA VOLUME KEGIATAN DPRD DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI SEBAGAI LEMBAGA PERWAKILAN		
				PELAKSANAAN KEGIATAN DPRD YANG SIFATNYA INSIDENTIL DAN TIDAK TERJADWAL MENYEBABKAN KURANGNYA KOORDINASI DALAM PELAKSANAANNYA		
				TINGGINYA TUNTUTAN PROFESIONALISME APARATUR SEKRETARIAT DPRD DALAM Mendukung PELAYANAN FASILITASI TUGAS DPRD		
				CEPATNYA PERUBAHAN INSTRUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN SERING BERUBAH-UBAHNYA REGULASI DARI PEMERINTAH PUSAT		

3.3. Strategi Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Renstra Sekretariat DPRD NTB merupakan penjabaran dari RPJMD, sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD NTB dengan
Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO	RPJMD PROVINSI NTB TAHUN 2025-2029					RENSTRA SETWAN PROVINSI NTB TAHUN 2025-2029		
	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ ALAT UKUR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR/ ALAT UKUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Tujuan ke- 14: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif		✓ Indeks Ketahanan Daerah			✓ Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi		✓ Indeks Kinerja Lembaga Legislatif (Indeks) ✓ Prevalensi hearing, audiensi, dan berbagai forum DPR (RDP Umum, seminar, uji publik, sosialisasi, dan sejenisnya) di DPRD Provinsi yang melibatkan masyarakat (%).
		Sasaran ke -24: Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	✓ Indeks Demokrasi Indonesia (IDI): Sedang 75,37-78,63 (2025)	✓ Transformasi Sektor Publik Sebagai Pengungkit	✓ Menjaga Stabilitas Politik, Keamanan, dan Ketertiban Umum ✓ Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat ✓ Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Ideologi Pancasila ✓ Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial ✓ Penguatan Sinergi Pusat – Daerah dan Antar Wilayah		✓ Meningkatkan Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan ✓ Meningkatkan Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	✓ Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%) ✓ Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%) ✓ Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)

Sumber: RPJMD NTB Tahun 2025-2029, data diolah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB adalah strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD NTB untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam rangka membantu mewujudkan Tujuan dan Sasaran. Strategi yang akan digunakan Sekretariat DPRD untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan yaitu dengan meningkatkan standarisasi pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD dan fasilitasi koordinasi antara pihak legislative dengan eksekutif.

Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Tenaga Ahli, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Data dan Informasi.
2. Memfasilitasi Koordinasi Antara Pihak Legislatif dengan Eksekutif.

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TAHUN 2025-2029				
SASARAN PEMBANGUNAN ke -4	KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DAERAH SEMAKIN EFEKTIF MENINGKATKAN INOVASI DAN DAYASAING DAERAH			
ARAH PEMBANGUNAN	Penegakan hukum berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansial			
TUJUAN 14	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif			
SASARAN 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas			
RENSTRA SETWAN PROVINSI NTB TAHUN 2025-2029				
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Terwujudnya Peningkatan Kinerja Lembaga Legislatif dan Kualitas Demokrasi	1. Meningkatnya Kualitas Persidangan dan Kajian Peraturan Perundang-Undangan. 2. Meningkatnya Kualitas Penganggaran dan Pengawasan	Penyediaan Tenaga Ahli, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Ketersediaan Data dan Informasi	1	Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli
			2	Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur
			3	Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
			4	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan
			5	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Lengkap, Akurat dan Andal Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	Memfasilitasi Koordinasi Antara Pihak Legislatif dengan Eksekutif		6	Optimalisasi Dukungan dan Layanan Prima Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
			7	Optimalisasi Fasilitasi Koordinasi Antara Legislatif dengan Eksekutif
			8	Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Profesional, Baik dan Bersih Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB
			9	Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penataan dan Pelatihan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-Undangan Seperti Naskah Akademik.

			10	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan SDM Aparatur, Penataan Organisasi, Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas
--	--	--	----	---

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

Strategi yang digunakan Sekretariat DPRD Provinsi NTB selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD NTB dapat dilihat pada tabel 3.6 diatas.

✓ **Pentahapan Pembangunan sesuai dengan Prioritas Pembangunan Tahunan dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB**

Tabel 3.7
Pentahapan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2026-2030

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dan Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dan Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dan Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dan Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan dan Kepegawaian, Administrasi Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah
Perencanaan & Pembangunan Gedung Baru DPRD NTB/Rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD NTB	Pembangunan Gedung Baru DPRD NTB/Rehabilitasi Gedung Sekretariat DPRD NTB	-	-	-
-	Pemeliharaan Gedung Baru DPRD NTB dan Gedung Sekretariat DPRD NTB	Pemeliharaan Gedung Baru DPRD NTB dan Gedung Sekretariat DPRD NTB	Pemeliharaan Gedung Baru DPRD NTB dan Gedung Sekretariat DPRD NTB	Pemeliharaan Gedung Baru DPRD NTB dan Gedung Sekretariat DPRD NTB
Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD, Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan
Fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi daerah	Fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi	Fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi	Fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi	Fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	2	3	4	5
	masyarakat dan kualitas demokrasi daerah	masyarakat dan kualitas demokrasi daerah	masyarakat dan kualitas demokrasi daerah	masyarakat dan kualitas demokrasi daerah

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

✓ **Lokus Rencana Strategis Sekretariat DPRD Provinsi NTB sesuai dengan Kebutuhan Pengembangan Daerah**

Lokus kegiatan dan subkegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB meliputi seluruh kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk administrasi kesekretariatan dan keuangan, penyelenggaraan persidangan, penyediaan tenaga ahli, dan pengelolaan aset yang dilaksanakan pada 10 kabupaten/kota se-NTB serta provinsi lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.4. Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam mencapai tujuan dan sasaran Restra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah panduan atau pedoman yang mengarahkan rumusan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Arah kebijakan merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi pembangunan yang difokuskan pada prioritas pencapaian tujuan. Dengan kata lain, arah kebijakan memberikan arah yang lebih spesifik dan terarah dalam implementasi strategi. Arah Kebijakan yang diambil sebagai arah dalam menentukan program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Arah Kebijakan yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan strategi diatas adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli.
2. Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur.
3. Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan.
4. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan.
5. Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Lengkap, Akurat dan Andal Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6. Optimalisasi Dukungan dan Layanan Prima Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Optimalisasi Fasilitas Koordinasi Antara Legislatif dengan Eksekutif.
8. Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Profesional, Baik dan Bersih Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB.
9. Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penataan dan Pelatihan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang- Undangan Seperti Naskah Akademik.
10. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan SDM Aparatur, Penataan Organisasi,

Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas.

Tabel 3.8
Rumusan Arah Kebijakan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB

No.	Operasi onalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Optimalisasi Penyediaan Tenaga Ahli	
			Meningkatkan Kompetensi dan Profesionalisme Aparatur	
		21. Menjaga stabilitas politik, keamanan dan ketertiban umum	Meningkatkan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan	
		22. Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Pelayanan	
		23. Peningkatan wawasan kebangsaan dan ideologi pancasila	Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi yang Lengkap, Akurat dan Andal Sebagai Bahan Dalam Pengambilan Keputusan DPRD	
		24. Pencegahan dan penanganan potensi konflik	Optimalisasi Dukungan dan Layanan Prima Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	
		25. Penguatan Sinergi Pusat – Daerah dan Antar Wilayah	Optimalisasi Fasilitas Koordinasi Antara Legislatif dengan Eksekutif	
			Meningkatkan Tata Kelola Kelembagaan Pemerintahan yang Profesional, Baik dan Bersih Di Lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi NTB	
			Peningkatan Kualitas Layanan Persidangan, Pengembangan Strategi dan Komunikasi Parlemen, Penataan dan Pelatihan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Produk Perundang-Undangan Seperti Naskah Akademik.	
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Pengelolaan SDM Aparatur, Penataan Organisasi, Perencanaan, Pengelolaan Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Pengadministrasian Barang Milik Negara dan Perjalanan Dinas	

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

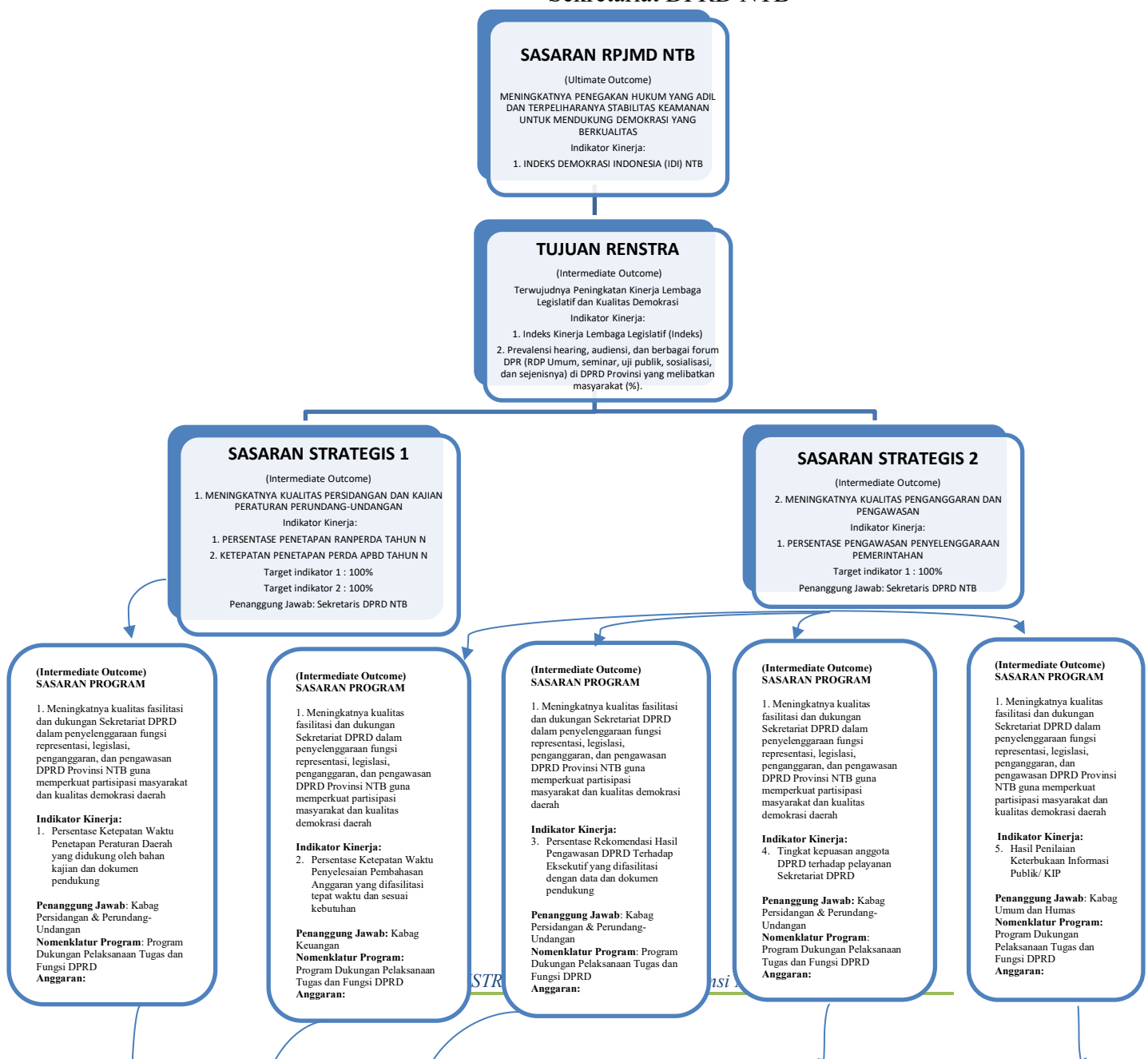
4.1 Uraian Program

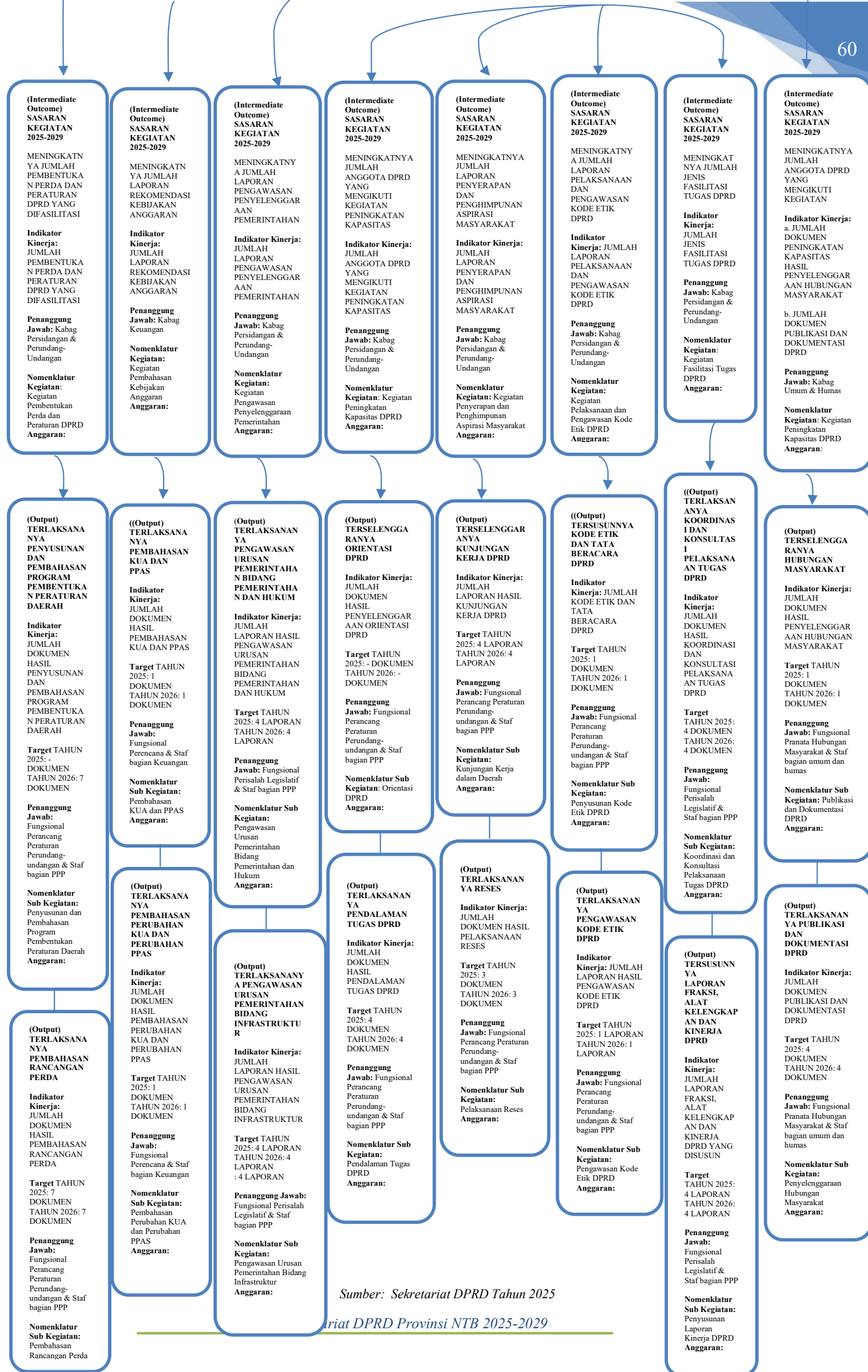
Program, Kegiatan, Subkegiatan merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra yang merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome dan output yang telah ditetapkan. Sebagai perwujudan dalam mendukung Prioritas Daerah Provinsi NTB Tahun 2025-2029, Sekretariat DPRD Provinsi NTB telah merumuskan dalam bentuk program prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai implementasi Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB, secara lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

✓ Cascading

Tabel 4.1

Cascading Kinerja mulai dari Tujuan, Sasaran sampai dengan Outcome dan Output Sekretariat DPRD NTB





Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

riat DPRD Provinsi NTB 2025-2029

4.2 Uraian Kegiatan

Rencana Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu pada masing-masing bidang untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, program kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Periode Tahun 2025-2029 dapat dilihat (pada tabel 4.2):

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- i. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
- j. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD

b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD

- a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
- b. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran
- c. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
- d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD
- e. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
- f. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
- g. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD

Tabel 4.2
Rumusan Program, kegiatan, Subkegiatan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	QUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK :							
TUJUAN KE-14 RPJMD: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN INOVATIF SERTA KEPEMIMPINAN DAERAH YANG KOLABORATIF							
		SASARAN KE-24 RPJMD: MENINGKATNYA PENEGAKAN HUKUM YANG ADIL DAN TERPELIHARANYA STABILITAS KEAMANAN UNTUK MENDUKUNG DEMOKRASI YANG BERKUALITAS					
	TUJUAN RENSTRA OPD: TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DAN KUALITAS DEMOKRASI				1. INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (INDEKS) 2. PREVALENSI HEARING, AUDIENSI, DAN BERBAGAI FORUM DPR (RDP UMUM, SEMINAR, UJI PUBLIK, SOSIALISASI, DAN SEJENISNYA) DI DPRD PROVINSI YANG MELIBATKAN MASYARAKAT (PERSEN)		
		SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN			PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (PERSEN) KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (PERSEN)		
		SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN			PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (PERSEN)		
			MENINGKATNYA KUALITAS FASILITASI DAN DUKUNGAN SEKRETARIAT DPRD DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI REPRESENTASI, LEGISLASI, PENGANGGARAN, DAN PENGAWASAN DPRD PROVINSI NTB GUNA		PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERATURAN DAERAH YANG DIDUKUNG OLEH BAHAN KAJIAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG (Persen) PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN YANG DIFASILITASI TEPAT WAKTU DAN SESUAI KEBUTUHAN (Persen)	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	QUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	KET
			MEMPERKUAT PARTISIPASI MASYARAKAT DAN KUALITAS DEMOKRASI DAERAH		PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF YANG DIFASILITASI DENGAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG (Persen)		
					TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD (nilai (kategori)		
					HASIL PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK/ KIP (nilai) (predikat)		
				Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	
				Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	
				Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan Rancangan Perda	
				Terselenggaranya Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang- Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	
				Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	Penyusunan Tata Tertib DPRD	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	
				Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	QUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	KET
				KUA dan Perubahan PPAS			
				Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	
				Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Pembahasan Perubahan APBD	
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Pembahasan Laporan Semester	
				Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
				Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	
				Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	
				Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	QUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	KET
				Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	
				Meningkatnya Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	
				Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	
				Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	
				Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
				Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	
				Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	
				Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	
				Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	
				Meningkatnya Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
				Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	
				Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
				Terlaksananya Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Pelaksanaan Reses	
				Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	
				Meningkatnya Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
				Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	
				Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN	KET
				Meningkatnya Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	
				Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
				Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
				Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Skor (72,05)	Skor	(73,76)	84.417.008.15 5	(74,23)	87.574.261.2 60	(74,98)	89.790.37 5.682	(75,73)	92.067.059.60 6	(76,48)	94.406.073.445	Kabag Keuan gan, Kabag umum dan Huma s dan Kabag Persid angan dan Perud ang- undan gan
		Katego ri BB	Katego ri	BB		BB		BB		BB		BB		

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	22	Doku men	26	564.831.119	27	564.802.810	26	774.802.810	26	894.802.810	26	1.014.802.810	Kabag · Keuan gan
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokum en	2	206.418.700	3	206.418.700	2	236.418.700	2	256.418.700	2	276.418.700	Kabag. Keuan gan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokum en	1	57.193.660	1	57.193.660	1	87.193.660	1	97.193.660	1	107.193.660	Kabag. Keuan gan
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dokum en	1	97.825.800	1	97.825.800	1	127.825.800	1	137.825.800	1	157.825.800	Kabag. Keuan gan
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokum en	1	11.145.850	1	11.145.850	1	41.145.850	1	61.145.850	1	81.145.850	Kabag. Keuan gan
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokum en	1	29.781.000	1	29.781.000	1	59.781.000	1	79.781.000	1	99.781.000	Kabag. Keuan gan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian	1	Lapora n	3	34.714.709	3	34.686.400	3	64.686.400	3	84.686.400	3	94.686.400	Kabag. Keuan gan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Lapora n	17	127.751.400	17	127.751.400	17	157.751.400	17	177.751.400	17	197.751.400	Kabag. Keuan gan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen	100	13.754.654.926	100	13.824.492.076	100	14.079.566.005	100	14.294.366.005	100	14.826.576.005	Kabag . Keuan gan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	123	Orang	106	13.413.512.776	106	13.413.512.776	106	13.513.586.705	106	13.614.386.705	106	14.016.596.705	Kabag. Keuan gan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	Dokum en	1	144.777.700	1	160.211.100	1	210.211.100	1	240.211.100	1	290.211.100	Kabag. Keuan gan
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500	Dokum en	7500	165.739.250	7500	220.143.000	7500	270.143.000	7500	300.143.000	7500	350.143.000	Kabag. Keuan gan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lapora n	1	29.486.800	1	29.486.800	1	79.486.800	1	129.486.800	1	154.486.800	Kabag. Keuan gan
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	Dokum en	1	1.138.400	1	1.138.400	1	6.138.400	1	10.138.400	1	15.138.400	Kabag. Keuan gan
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah	100	Persen	100	8.174.000	100	13.128.000	100	14.000.000	100	21.000.000	100	25.000.000	Kabag . Umum dan Huma s
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan	2	Dokum en	2	1.907.000	2	3.737.000	2	4.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	Kabag. Umum dan Humas

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	Barang Milik Daerah SKPD													
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	Lapora n	2	1.627.000	2	4.751.000	2	5.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	Kabag. Umum dan Humas
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lapora n	4	4.640.000	4	4.640.000	4	5.000.000	4	7.000.000	4	9.000.000	Kabag. Umum dan Humas
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah	1	Doku men	1	293.881.000	1	665.420.200	1	857.420.200	1	927.420.200	1	1.017.420.200	Kabag Umum dan Huma s
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Unit	1	24.651.000	1	429.901.000	1	459.901.000	1	489.901.000	1	519.901.000	Sub Bagian TU
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1	Paket	1	60.000.000	0	-	1	80.000.000	1	90.000.000	1	100.000.000	Kabag. Umum dan Humas
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	Dokum en	1	230.000	1	26.519.200	1	46.519.200	1	56.519.200	1	76.519.200	Sub Bagian TU
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4	Orang	4	40.000.000	4	40.000.000	4	90.000.000	4	100.000.000	4	120.000.000	Sub Bagian TU
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50	Orang	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kabag. Keuan gan
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	Orang	24	169.000.000	24	169.000.000	24	181.000.000	24	191.000.000	24	201.000.000	Sub Bagian TU

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100	Persen	100	3.676.331.755	100	5.680.808.055	100	6.213.208.055	100	6.603.208.055	100	6.943.208.055	Kabag . Umum dan Humas
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	2	72.680.000	2	92.822.000	2	142.822.000	2	162.822.000	2	182.822.000	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	2	426.507.155	2	344.779.455	2	444.779.455	2	464.779.455	2	484.779.455	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	2	394.761.100	2	394.761.100	2	444.761.100	2	464.761.100	2	484.761.100	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	2	162.303.000	2	172.303.000	2	202.303.000	2	222.303.000	2	242.303.000	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7	Dokumen	7	130.150.000	7	180.280.000	7	180.280.000	7	200.280.000	7	220.280.000	Kabag. Umum dan Humas
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	4	1.423.415.000	4	2.505.000.000	4	2.705.000.000	4	2.805.000.000	4	2.905.000.000	Kabag. Umum dan Humas
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	4	855.430.000	4	1.777.630.000	4	1.877.630.000	4	2.027.630.000	4	2.127.630.000	Kabag. Umum dan Humas
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Dokumen	1	33.336.500	1	33.336.500	1	35.736.500	1	45.736.500	1	65.736.500	Sub Bagian TU
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	177.749.000	1	179.896.000	1	179.896.000	1	209.896.000	1	229.896.000	Kabag. Umum dan Humas

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah	4	Unit	42	1.451.113.800	11	2.418.496.130	11	2.618.496.130	13	2.918.496.130	13	3.148.496.130	Kabag. Umum dan Humas
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4	Unit	1	715.000.000	1	715.000.000	1	715.000.000	1	715.000.000	1	715.000.000	Kabag. Umum dan Humas
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9	Unit	0	-	0	-	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	Kabag. Umum dan Humas
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kabag. Umum dan Humas
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	2	311.113.800	2	542.243.800	2	592.243.800	2	692.243.800	2	722.243.800	Kabag. Umum dan Humas
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9	Unit	40	425.000.000	9	1.161.252.330	9	1.241.252.330	9	1.441.252.330	9	1.641.252.330	Kabag. Umum dan Humas
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0	Unit	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	Kabag. Umum dan Humas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabag. Umum dan Humas
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	Persen	100	6.328.420.520	100	6.404.695.520	100	6.804.695.520	100	6.864.695.520	100	6.934.695.520	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	4	92.155.000	4	92.155.000	4	142.155.000	4	162.155.000	4	182.155.000	Kabag. Keuangan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lapora n	4	843.645.000	4	843.645.000	4	893.645.000	4	913.645.000	4	933.645.000	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	Lapora n	2	289.595.000	2	289.595.000	2	589.595.000	2	609.595.000	2	639.595.000	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lapora n	1	5.103.025.520	1	5.179.300.520	1	5.179.300.520	1	5.179.300.520	1	5.179.300.520	Kabag. Umum dan Humas
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	90	Unit	247	3.528.472.000	373	3.102.697.929	373	3.528.472.000	373	4.218.472.000	373	5.278.472.000	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	4	Unit	5	192.600.000	5	192.600.000	5	192.600.000	5	212.600.000	5	232.600.000	Kabag. Umum dan Humas
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	66	Unit	66	687.470.000	66	687.470.000	66	687.470.000	66	737.470.000	66	757.470.000	Kabag. Umum dan Humas
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit	50	17.500.000	70	17.500.000	70	17.500.000	70	37.500.000	70	57.500.000	Kabag. Umum dan Humas
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10	Unit	123	295.538.000	228	295.538.000	228	295.538.000	228	395.538.000	228	495.538.000	Kabag. Umum dan Humas
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	Unit	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	Kabag. Umum dan Humas

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3	Unit	2	2.300.364.000	3	1.874.589.929	3	2.300.364.000	3	2.800.364.000	3	3.700.364.000	Kabag. Umum dan Humas
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantoratau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	0	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Kabag. Umum dan Humas
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah jenis layanan keuangan DPRD	3	Jenis Layanan	3	54.011.326.360	3	54.011.326.360	3	54.011.326.360	3	54.161.326.360	3	54.161.326.360	Kabag. Umum dan Humas dan Kabag. Keuangan
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima Hak Keuangan DPRD	65	Orang/ Bulan	65	52.723.576.360	65	52.723.576.360	65	52.723.576.360	65	52.823.576.360	65	52.823.576.360	Kabag. Keuangan
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan	2	Paket	2	897.750.000	2	897.750.000	2	897.750.000	2	947.750.000	2	947.750.000	Kabag. Umum dan Humas
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang Yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65	Orang	65	390.000.000	65	390.000.000	65	390.000.000	65	390.000.000	65	390.000.000	Kabag. Umum dan Humas
Layanan Adminstrasi DPRD	Jumlah jenis layanan administrasi DPRD	4	Jenis Layanan	3	799.802.675	3	888.394.180	3	888.388.602	4	1.163.272.526	3	1.056.076.365	Kabag. Umum dan Humas dan Kabag. Persidangan dan Perundangan
Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Administrasi Keanggotaan DPRD	1	Dokumen	0	-	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	Kabag. Persidangan dan Perundangan
Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	1	Laporan	4	229.520.720	4	298.814.320	4	298.814.320	4	365.814.320	4	395.814.320	Kabag. Persidangan dan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
														Peruda ng- undang an
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1	Lapora n	4	90.283.800	4	109.578.600	4	109.578.600	4	110.458.600	4	160.258.600	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	3	Paket	12	479.998.155	12	480.001.260	12	479.995.682	12	536.999.606	12	500.003.445	Kabag. Umum dan Humas
					57.248.550.000		59.333.080.000		61.335.710.000		63.586.810.000		64.863.660.000	
MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N		PERS EN (%)	100	1.512.521.110	100	1.905.531.600	100	1.905.531.600	100	1.905.531.600	100	1.905.531.600	Sekret aris DPRD
	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		PERS EN (%)	100		100		100		100		100		
MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	Persentase Pengawasan Penyelenggara an Pemerintahan		PERS EN (%)	100	55.736.028.890	100	57.427.548.400	100	59.430.178.400	100	61.681.278.400	100	62.958.128.400	Sekret aris DPRD
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					57.248.550.000		59.333.080.000		61.335.710.000		63.586.810.000		64.863.660.000	
Meningkatnya kualitas fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah yang didukung oleh bahan kajian dan dokumen pendukung	NA	PERS EN	100	1.512.521.110	100	1.905.531.600	100	1.905.531.600	100	1.905.531.600	100	1.905.531.600	Kabag . Persid angan dan Perun dang- undan gan
	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran yang difasilitasi tepat waktu dan sesuai kebutuhan	NA	PERS EN	100	1.307.197.500	100	1.310.197.500	100	1.307.197.500	100	1.307.197.500	100	1.307.197.500	Kabag . Keuan gan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif yang difasilitasi dengan data dan dokumen pendukung	NA	PERS EN	100	492.865.850	100	492.865.850	100	727.252.930	100	492.865.850	100	492.865.850	Kabag . Persid angan dan Perun dang- undan gan
	Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	80.03	KATE GORI NILAI	Puas (80)	53.018.305.540	Puas (81)	54.174.059.350	Puas (81)	55.602.359.350	Puas (82)	58.087.846.430	Sanga t Puas (82)	59.085.025.050	Kabag Persid angan & PP
	Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik/ Predikat KIP	Inform atif	PREDI KAT NILAI	Infor matif 90	917.660.000	Infor matif 91	1.450.425.700	Infor matif 91	1.793.368.620	Infor matif 92	1.793.368.620	Infor matif 92	2.073.040.000	Kabag Umum dan Huma s
Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	9	Perda dan Peratu ran DPRD	7	1.512.521.110	7	1.905.531.600	7	1.905.531.600	7	1.905.531.600	7	1.905.531.600	Kabag . Persid angan dan Perun dang- undan gan
Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	6	Dokum en	10	519.022.510	10	1.012.033.000	10	1.012.033.000	10	1.012.033.000	10	1.012.033.000	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	9	Dokum en	7	86.379.500	7	86.379.500	7	86.379.500	7	86.379.500	7	86.379.500	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1	Dokum en	1	368.088.000	1	368.088.000	1	368.088.000	1	368.088.000	1	368.088.000	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau	1	Dokum en	7	403.255.000	7	403.255.000	7	403.255.000	7	403.255.000	7	403.255.000	Kabag. Persida ngan dan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi													Peruda ng-undang an
Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	1	Dokum en	1	35.776.100	1	35.776.100	1	35.776.100	1	35.776.100	1	35.776.100	Kabag. Persida ngen dan Peruda ng-undang an
Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	100	Orang	100	100.000.000	0		0	-	0	-	0	-	Kabag. Persida ngen dan Peruda ng-undang an
Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	5	Lapor an	6	1.307.197.500	6	1.310.197.500	6	1.307.197.500	6	1.307.197.500	6	1.307.197.500	Kabag . Keuan gan
Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	Dokum en	1	409.368.500	1	409.368.500	1	409.368.500	1	409.368.500	1	409.368.500	Kabag. Keuan gan
Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Dokum en	1	378.678.500	1	378.678.500	1	378.678.500	1	378.678.500	1	378.678.500	Kabag. Keuan gan
Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	Dokum en	1	128.393.500	1	128.393.500	1	128.393.500	1	128.393.500	1	128.393.500	Kabag. Keuan gan
Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	Dokum en	1	179.779.000	1	179.779.000	1	179.779.000	1	179.779.000	1	179.779.000	Kabag. Keuan gan
Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	0	Dokum en	1	105.489.000	1	108.489.000	1	105.489.000	1	105.489.000	1	105.489.000	Kabag. Keuan gan
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjaban APBD	1	Dokum en	1	105.489.000	1	105.489.000	1	105.489.000	1	105.489.000	1	105.489.000	Kabag. Keuan gan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	7	Laporan	5	492.865.850	5	492.865.850	5	727.252.930	5	492.865.850	5	492.865.850	Kabag. Persidangan dan Perundang-undangan
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	Laporan	4	98.573.170	4	98.573.170	4	332.960.250	4	98.573.170	4	90.573.170	Kabag. Persidangan dan Perundang-an
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1	Laporan	4	98.573.170	4	98.573.170	4	98.573.170	4	98.573.170	4	90.573.170	Kabag. Persidangan dan Perundang-an
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	Laporan	4	98.573.170	4	98.573.170	4	98.573.170	4	98.573.170	4	90.573.170	Kabag. Persidangan dan Perundang-an
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1	Laporan	4	98.573.170	4	98.573.170	4	98.573.170	4	98.573.170	4	90.573.170	Kabag. Persidangan dan Perundang-an
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	1	Laporan	4	98.573.170	4	98.573.170	4	98.573.170	4	78.573.170	4	90.573.170	Kabag. Persidangan dan Perundang-an
Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	0	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1	20.000.000	Kabag. Keuangan
Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	0	Dokumen	0	0	0	-	0	-	0	-	1	20.000.000	Kabag. Persidangan dan Perundang-

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
														undang an
Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungja waban Kepala Daerah	0	Dokum en	0	-	0	-	0	-	1	20.000.000	0	-	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	65	Orang	65	4.948.424.700	65	6.685.014.40 0	65	7.427.257. 320	65	8.546.843.790	65	7.706.928.700	Kabag . Persid angan dan Perun dang- undan gan & Kabag Umum dan Huma s
Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraa n Orientasi DPRD	1	Dokum en	0	-	0	-	0	-	1	1.000.000.000	0	-	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	65	Dokum en	4	3.116.504.500	4	4.190.328.50 0	4	4.190.328. 500	4	4.190.328.500	4	4.190.328.500	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	40	Orang/ Jam	582	457.300.000	582	587.300.000	582	986.600.0 00	582	986.600.000	582	986.600.000	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	Orang	8	456.960.200	8	456.960.200	8	456.960.2 00	8	456.960.200	8	456.960.200	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraa n Hubungan Masyarakat	1	Dokum en	1	58.730.000	1	58.730.000	1	58.730.00 0	1	58.730.000	1	58.730.000	Kabag. Umum dan Humas

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1	Dokum en	0	0	0	-	0	-	1	119.586.470	0	-	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1	Dokum en	4	858.930.000	4	1.391.695.70 0	4	1.734.638. 620	4	1.734.638.620	4	2.014.310.000	Kabag. Umum dan Humas
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3	Lapor an	3	39.113.886.45 0	3	39.065.816.2 60	3	40.094.81 6.260	3	41.460.716.87 0	3	43.577.481.960	Kabag . Persid angan dan Perun dang- undan gan & Kabag Keuan gan
Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	1	Lapora n	4	4.846.610.000	4	4.846.610.00 0	4	4.846.610. 000	4	4.846.610.000	4	4.846.610.000	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	2	Dokum en	2	160.740.300	2	160.740.300	2	160.740.3 00	2	160.740.300	2	160.740.300	Kabag. Keuan gan
Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	Dokum en	3	20.106.536.15 0	3	20.058.465.9 60	3	21.087.46 5.960	3	22.453.366.57 0	3	24.570.131.660	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	200	Orang	19500	14.000.000.00 0	19500	14.000.000.0 00	19500	14.000.00 0.000	19500	14.000.000.00 0	19500	14.000.000.000	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	2	Lapor an	1	66.882.890	2	66.882.890	2	66.882.89 0	2	66.882.890	2	66.882.890	Kabag . Persid angan dan Perun dang- undan gan
Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata	1	Dokum en	1	28.914.950	1	28.914.950	1	28.914.95 0	1	28.914.950	1	28.914.950	Kabag. Persida ngan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGI ATAN/SUBKEGIATAN/OUTPUT	INDIKATO R OUTCOME /OUTPUT	BASE LINE 2024	SATU AN	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET.
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
	Beracara DPRD													dan Peruda ng- undang an
Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	Lapora n	1	37.967.940	1	37.967.940	1	37.967.940	1	37.967.940	1	37.967.940	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	5	Jenis Fasilit asi	4	9.806.771.500	5	9.806.771.500	5	9.806.771.500	5	9.806.771.500	5	9.806.771.500	Kabag . Persid angan dan Perun dang- undan gan
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1	Dokum en	4	8.742.730.000	4	8.742.730.000	4	8.742.730.000	4	8.742.730.000	4	8.742.730.000	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	1	Lapora n	1	33.143.500	1	33.143.500	1	33.143.500	1	33.143.500	1	33.143.500	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	1	Dokum en	4	124.787.100	4	124.787.100	4	124.787.100	4	124.787.100	4	124.787.100	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1	Dokum en	4	827.110.900	4	827.110.900	4	827.110.900	4	827.110.900	4	827.110.900	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1	Dokum en	1	79.000.000	1	79.000.000	1	79.000.000	1	79.000.000	1	79.000.000	Kabag. Persida ngan dan Peruda ng- undang an
Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025					141.665.558.155		146.907.341.260		151.126.085.682		155.653.869.606		159.269.733.445	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tabel. 4.4

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

<i>Sekretariat DPRD Provinsi NTB mendukung</i>				
PROGRAM UNGGULAN Ke-9: "NTB Good & SMART Governance" dan				
KEGIATAN STRATEGIS ke-95: "Edukasi, Sosialisasi dan Kampanye Literasi Demokrasi dan Penghormatan Hak Azasi Manusia di Lembaga Pendidikan dan Publik				
No	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi daerah		Persentase ketepatan waktu penetapan peraturan daerah yang didukung oleh bahan kajian dan dokumen pendukung Persentase ketepatan waktu penyelesaian pembahasan anggaran yang difasilitasi tepat waktu dan sesuai kebutuhan Persentase rekomendasi hasil pengawasan DPRD terhadap eksekutif yang difasilitasi dengan data dan dokumen pendukung Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD Hasil penilaian keterbukaan informasi publik/ KIP
Kode Rekening	Major Project	Sasaran	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
1	2	3	4	5
4.02.02.1.01		Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi
4.02.02.1.01.01	- Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemeperda) dengan Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Perda, Penyusunan Ranperda - FGD, Uji Publik	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
4.02.02.1.01.02	Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemeperda) dengan Perangkat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Perda, Penyusunan Ranperda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda
4.02.02.1.01.03	- Rapat Persiapan Sosialisasi Ranperda - Sosialisasi Ranperda kepada Masyarakat, - Rapat Evaluasi Kegiatan Sosialisasi	Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan
4.02.02.1.01.04	Laporan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi
4.02.02.1.01.05	Penyusunan Dokumen Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun
4.02.02.1.01.06	Memfasilitasi Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
4.02.02.1.02		Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran
4.02.02.1.02.01	Penyusunan Dokumen Fasilitasi Rapat pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS

No	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5
4.02.02.1.02.02	Penyusunan Dokumen Fasilitasi Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
4.02.02.1.02.03	Penyusunan Dokumen Fasilitasi Rapat Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
4.02.02.1.02.04	Penyusunan Dokumen Fasilitasi Rapat Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD
4.02.02.1.02.05	Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester
4.02.02.1.02.06	Penyusunan Dokumen Fasilitasi Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
4.02.02.1.03		Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
4.02.02.1.03.01	Laporan Fasilitasi Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
4.02.02.1.03.02	Laporan Fasilitasi Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
4.02.02.1.03.03	Laporan Fasilitasi Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
4.02.02.1.03.04	Laporan Fasilitasi Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
4.02.02.1.03.05	Laporan Fasilitasi Rapat Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
4.02.02.1.03.06	Laporan Fasilitasi Rapat Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
4.02.02.1.03.07		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran
4.02.02.1.03.08		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
4.02.02.1.04		Meningkatnya Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas
4.02.02.1.04.01	Penyusunan Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil penyelenggaraan Orientasi DPRD
4.02.02.1.04.02	Laporan Pelaksanaan Kegiatan Workshop/Bimtek DPRD yang diikuti oleh 65 orang anggota DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
4.02.02.1.04.04	Penyediaan kelompok pakar dan tim ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
4.02.02.1.04.05	Penyediaan tenaga ahli fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
4.02.02.1.04.06	Laporan Fasilitasi Kegiatan Hearing DPRD	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
4.02.02.1.04.07	Penyusunan Dokumen Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD
4.02.02.1.04.08	Penyusunan Laporan/Dokumen	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD

No	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR
1	2	3	4	5
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD			
4.02.02.1.05		Meningkatnya Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat
4.02.02.1.05.01	Laporan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
4.02.02.1.05.02	Penyusunan Laporan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun
4.02.02.1.05.03	Laporan pelaksanaan fasilitasi Reses	Terlaksananya Reses	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
4.02.02.1.05.04	Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
4.02.02.1.06		Meningkatnya Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD
4.02.02.1.06.01	Penyusunan dokumen kode etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD
4.02.02.1.06.02	Penyusunan Laporan pengawasan kode etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD
4.02.02.1.08		Meningkatnya Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD
4.02.02.1.08.01	Laporan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
4.02.02.1.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun
4.02.02.1.08.03	Laporan Fasilitasi Rapat Badan Musyawarah DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
4.02.02.1.08.04	Laporan Fasilitasi Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Pimpinan serta Penyediaan Tenaga Ahli Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
4.02.02.1.08.05	Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

Sumber: Sekretariat DPRD Tahun 2025

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator yang komprehensif tidak hanya memperhatikan aspek output saja, namun juga memperhatikan faktor-faktor sebelum output didapatkan dan aspek setelah output itu dicapai. Pada sektor publik seperti pemerintah menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat, karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama. Output pada sektor pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah indikator yang menjelaskan mengenai kinerja utama untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap Lembaga/Instansi Pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan Indikator Kinerja Utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, Indikator Kinerja Utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Provinsi NTB yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Renstra dan RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD pada 5 (lima) tahun yang akan datang.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Provinsi NTB

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN								
1	PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N (%)	PERSEN	100	100	100	100	100	100	
2	KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N (%)	PERSEN	100	100	100	100	100	100	
	MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN								
3	PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN (%)	PERSEN	100	100	100	100	100	100	

Sumber: Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. IKK membantu mengukur kinerja dan memberikan gambaran mengenai sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan Penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dan sering digunakan dalam berbagai bidang, termasuk bisnis, dan pendidikan. Dalam pemerintahan, IKK digunakan untuk mengukur kinerja berbagai urusan pemerintahan dan dapat mengukur kinerja berbagai aspek, seperti penjualan, kepuasan pelanggan, dan efisiensi, dsb. Berdasarkan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi NTB merumuskan Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENETAPAN PERATURAN DAERAH YANG DIDUKUNG OLEH BAHAN KAJIAN DAN DOKUMEN PENDUKUNG (%)	PERSEN	100	100	100	100	100	100	
2	PERSENTASE KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN PEMBAHASAN ANGGARAN YANG DIFASILITASI TEPAT WAKTU DAN SESUAI KEBUTUHAN (%)	PERSEN	100	100	100	100	100	100	
3	PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN DPRD TERHADAP EKSEKUTIF YANG DIFASILITASI DENGAN DATA DAN DOKUMEN PENDUKUNG (%)	PERSEN	100	100	100	100	100	100	
4	TINGKAT KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD	(NILAI) (KATEGORI)	(Nilai 80) Kategori Puas	(Nilai 80) Kategori Puas	(Nilai 81) Kategori Puas	(Nilai 81) Kategori Puas	(Nilai 82) Kategori Puas	(Nilai 82) Kategori Puas	
5	HASIL PENILAIAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK/KIP	(NILAI) (PREDIKAT)	90 INFORMATIF	90 INFORMATIF	91 INFORMATIF	91 INFORMATIF	92 INFORMATIF	92 INFORMATIF	
	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SUB KEGIATAN								
1	Rancangan Peraturan Daerah Yang Dibahas dan Disetujui	Perda	7	7	7	7	7	7	
2	Kegiatan Hearing/Dialog Pimpinan Dan Anggota DPRD Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Yang Difasilitasi	Kali/ Orang	480	480	480	480	480	480	
3	Rapat Alat Kelengkapan Dewan yang difasilitasi	Kali	268	268	268	268	268	268	
4	Rapat Paripurna Yang Difasilitasi	Kali	46	46	46	46	46	46	
5	Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	3	3	3	3	3	3	
6	Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	2860	2860	2860	2860	2860	2860	
7	Kegiatan Peningkatan Kapasitas (Bintek/Workshop) Yang Diikuti Oleh Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/ Orang	130	130	130	130	130	130	
8	Publikasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Yang Difasilitasi	Kali	36	36	36	36	36	36	

Sumber: Perencanaan Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Keterhubungan dan Kesesuaian antara Program, Kegiatan dan Subkegiatan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dan/atau Pertumbuhan Kinerja Urusan Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 5.1

TUJUAN	TERWUJUDNYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF DAN KUALITAS DEMOKRASI		
<i>INDIKATOR</i>	<i>INDEKS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF (INDEKS) PREVALENSI HEARING, AUDIENSI, DAN BERBAGAI FORUM DPR (RDP UMUM, SEMINAR, UJI PUBLIK, SOSIALISASI, DAN SEJENISNYA) DI DPRD PROVINSI YANG MELIBATKAN MASYARAKAT (%).</i>		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA KUALITAS PERSIDANGAN DAN KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
<i>INDIKATOR 1</i>	<i>PERSENTASE PENETAPAN RANPERDA TAHUN N</i>		
<i>INDIKATOR 2</i>	<i>KETEPATAN PENETAPAN PERDA APBD TAHUN N</i>		
SASARAN STRATEGIS	MENINGKATNYA KUALITAS PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN		
<i>INDIKATOR 3</i>	<i>PERSENTASE PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</i>		

PROGRAM	OUTCOME	INDIKATOR	KET.
Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan fungsi representasi, legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi masyarakat dan kualitas demokrasi daerah	1. Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah yang didukung oleh bahan kajian dan dokumen pendukung	
		2. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Pembahasan Anggaran yang difasilitasi tepat waktu dan sesuai kebutuhan	
		3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD Terhadap Eksekutif yang difasilitasi dengan data dan dokumen pendukung	
		4. Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	
		5. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik/KIP	

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 merupakan salah satu dokumen perencanaan yang melengkapi dan memiliki keterkaitan dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Rencana Strategis ini memuat program-program dan kegiatan pokok yang bersifat strategis atau memiliki prioritas tinggi untuk mencapai misi pembangunan yang telah ditetapkan. Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB dalam pelaksanaannya dijabarkan lebih lanjut secara operasional ke dalam Program Kerja Tahunan secara lebih detail sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi NTB.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan pembangunan wilayah, nasional dan sektoral dengan tetap menyesuaikan terhadap kondisi dan karakteristik daerah sesuai prinsip otonomi daerah, agar apa yang diupayakan Pemerintah Daerah dapat sejalan dengan upaya pemerintah Pusat demi sebesar-besar kemanfaatan bagi masyarakat.

Demikian Renstra ini disusun dengan mengakomodir saran dan masukan dari berbagai pihak dengan harapan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas Sekretariat DPRD Provinsi NTB selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Mataram, 2025

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



HENDRA SAGUTRA S.STP., M.H
NIP. 19810130 199912 1001